LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM

PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

PEMBIMBING :

Dr. Decky Irianti, MP

Oleh:

Jazzica Lutfi Lembong

NRP. 20.03.066

POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL

BANDUNG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul	:	LAPORAN PRAKTIKUM PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
Nama Mahasiswa	:	Jazzica Lutfi Lembong
NRP	:	20.03.066
Program	:	Program Studi Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan

Pembimbing:

(Dr. Decky Irianti, M.P)

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
Program Sarjana Terapan
Politeknik Kesejahteraan Sosial

Lina Favourita Sutiaputri, Ph. D

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah -Nya, serta petunjuk dan kemudahan yang selalu diberikan oleh-Nya praktikan mampu melaksanakan Praktikum Laboratorium dengan tetap bersyukur dan mampu menyelesaikan laporan Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial ini dengan tepat waktu.

Tersusunnya laporan ini tentu bukan karena buah kerja keras praktikan semata, melainkan juga atas bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya laporan ini, diantaranya:

1. Dr. Marjuki, M.Sc. selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
2. Lina Favourita, S.Ph.D selaku Ketua Program Studi Program Sarjana Terapan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
3. Dra. Atirista Nainggolan, MP selaku Kepala Laboratorium Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
4. Dr. Decky Irianti, MP selaku dosen pembimbing Praktikum Laboratorium yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, dan masukan kepada praktikan selama pelaksanaan praktikum dan penyelesaian laporan.
5. Ibu Melinasari, S Kom selaku Lurah Sukapura yang sudah mau menerima praktikan untuk menjalankan proses Praktikum Laboratorium ini berlangsung selama kurang lebihnya tiga bulan lamanya.
6. Ibu Yuliyanti selaku Kasi Kesos Kelurahan Sukapura dan Bapak Wasito selaku Sekretaris Lurah Sukapura yang menjadi pendamping lapangan yang mengarahkan situasi dan kondisi di lapangan kepada praktikan selama menjalankan praktikum.
7. Bapak Yance Ronald Lembong dan Ibu Tinawati Sukmaja selaku orangtua yang saya cintai terimakasih telah memberikan dukungan, semangat, dan doa selama melakukan penulisan laporan ini. Laporan ini tidak akan berjalan lancar tanpa ridho dari kedua orangtua.
8. Sahabat tercinta Alin Sawaliah dengan NPM 202050105, saya ucapkan terimakasih banyak karena senantiasa yang selalu ada untuk bersedia menjadi tempat serta mendengarkan keluh kesah jalannya proses penulisan laporan ini, canda tawa, dan selalu menyempatkan untuk hadir disetiap moment terindahku. Serta senantiasa membantu saya dalam keadaan apapun dan tidak henti-hentinya memberikan motivasi, dan nasihat dalam pengerjaan laporan ini. Tentunya saya berterimakasih atas segala hal yang

telah dilakukan guna meningkatkan semangat saat jalannya praktkum laboratorium ini berlangsung.

9. Rekan-rekan anggota kelompok 6 Praktikum Laboratorium yang saling mendukung dan membantu proses praktikum laboratorium.
10. Seluruh pihak yang membantu, mendukung dan mendoakan baik secara materiil maupun non materiil dalam proses pengerjaan laporan praktikum laboratorium.

Laporan ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu diperlukan kritik dan saran agar laporan praktikum laboratorium ini dapat disusun dengan lebih baik lagi. Praktikan berharap, laporan praktikum laboratorium ini bermanfaat bagi kepentingan akademis Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.

Bandung, 16 April 2023

Jazzica Lutfi Lembong

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR x
I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan dan Manfaat Praktikum 2
C. Waktu dan Lokasi Praktikum 4
D. Proses Praktikum 4
1) Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial 6
2) Peningkatan Kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial 8
3) Peningkatan Kompetensi Analis Pemeberdayaan Sosial 9
4) Peningkatan Kompetensi Analis Penataan Lingkungan Sosial 11
5) Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana 12
E. Sistematika Laporan 14
II. PRAKTIKUM LABORATORIUM 15
A. Profil Analis Jaminan Sosial 15
1. Gambaran Umum Masalah 15
2. Tinjauan Konsep/Teori yang Relevan dengan Masalah 16
3. Asesmen 20
a. Identifikasi Masalah 21
b. Identifikasi Kebutuhan 26
c. Identifikasi Potensi dan Sumber 26
4. Rencana Intervensi 27
a. Latar Belakang 27
b. Tujuan Umum dan Khusus 28
c. Bentuk Kegiatan dan Program 28
d. Sistem Partisipan 29
e. Metode dan Teknik 29
f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan 30

g. Analisis Kelayakan Program 32
h. Jadwal dan Langkah-langkah..... 33
i. Indikator Keberhasilan 34
B. Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial 34
1. Gambaran Umum Masalah..... 34
2. Tinjauan Konsep/Teori yang Relevan dengan Masalah..... 35
3. Asesmen 39
a. Identifikasi Masalah 39
b. Identifikasi Kebutuhan..... 43
c. Identifikasi Potensi dan Sumber..... 44
4. Rencana Intervensi 44
a. Latar Belakang..... 44
b. Tujuan Umum dan Khusus..... 45
c. Bentuk Kegiatan dan Program..... 45
d. Sistem Partisipan 45
e. Metode dan Teknik..... 46
f. Rencana Anggaran dan Alat yang Dibutuhkan 46
g. Analisis Kelayakan Program 48
h. Jadwal dan Langkah-Langkah..... 49
i. Indikator Keberhasilan 50
C. Profil Analis Pemberdayaan Sosial.....50
1. Gambaran Umum Masalah..... 50
2. Tinjauan Konsep/Teori yang Relevan dengan Masalah..... 50
3. Asesmen 53
a. Identifkasi Masalah..... 53
b. Identifikasi Kebutuhan..... 54
c. Identifikasi Potensi dan Sumber..... 55
4. Rencana Intervensi 55
a. Latar Belakang..... 55
b. Tujuan Umun dan Khusus..... 56
c. Bentuk Kegiatan dan Program..... 56
d. Sistem Partisipan 57
e. Metode dan Teknik..... 57
f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan 58

g. Rencana Anggaran Biaya 58
h. Analisis Kelayakan Program 59
i. Jadwal dan Langkah-langkah 60
j. Indikator Keberhasilan 61
D. Profil Analis Penataan Lingkungan 61
1. Gambaran Umum Masalah 61
2. Tinajaun Konsep/Teori yang Relevan dengan Masalah 61
3. Asesmen 63
a. Identifikasi Masalah 63
b. Identifikasi Kebutuhan 67
c. Identifikasi Potensi dan Sumber 67
4. Rencana Intervensi 67
a. Latar Belakang 67
b. Bentuk Kegiatan dan Program 68
c. Sistem Partisipan 69
d. Metode dan Teknik 69
e. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Digunakan 70
f. Analisis Kelayakan Program ..... Error! Bookmark not defined.
g. Jadwal dan Langkah-langkah 73
h. Indikator Keberhasilan 75
E. Profil Analis Penanggulangan Bencana 75
1. Gambaran Umum Masalah 75
2. Tinjauan Konsep/Teori yang Relevan dengan Masalah 75
3. Asesmen 79
a. Identifikasi Masalah 80
b. Identifikasi Kebutuhan 83
c. Identifikasi Potensi dan Sumber 84
4. Rencana Intervensi 84
a. Latar Belakang 84
b. Bentuk Kegiatan dan Program 85
c. Sistem Partisipan 86
d. Metode dan Teknik 86
e. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan 87
f. Analisis Kelayakan Program 89

g. Jadwal dan Langkah-langkah 90
h. Indikator Keberhasilan 91
III. KESIMPULAN DAN SARAN 92
A. Kesimpulan **92**
B. Saran **93**
DAFTAR PUSTAKA 94
LAMPIRAN 96

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukapura.....27
Tabel 2. 2 Tabel Rencana Bentuk Kegiatan Program, " Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Terkait Mekanisme Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung". 29
Tabel 2. 3 Sistem Program, "Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Terkait Mekanisme Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung". 29
Tabel 2. 4 Alat yang Dibutuhkan Dalam Program "Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Terkait Mekanisme Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung". 30
Tabel 2. 5 Rencana Anggaran Biaya " Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Terkait Mekanisme Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung". 31
Tabel 2. 6 Analisis SWOT Analis Jaminan Sosial.....32
Tabel 2. 7 Jadwal Kegiatan Program " Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Terkait Mekanisme Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung". 33
Tabel 2. 8 Bentuk Kegiatan dan Program Analis Sumber Dana Bansos 45
Tabel 2. 9 Sistem Partisipan Program "Sosialisasi Peningkatan Pemahaman terkait mekanisme Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung." 45
Tabel 2. 10 Alat yang dibutuhkan 47
Tabel 2. 11 Rencana Anggaran Biaya Program "Sosialisasi Peningkatan Pemahaman terkait mekanisme Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung." 47
Tabel 2. 12 Analisis SWOT Analis Sumber Dana Bantuan Sosial.....48
Tabel 2. 13 Jadwal Pelaksanaan Program "Peningkatan Pemahaman terkait mekanisme Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung." .....**Error! Bookmark not defined.**59
Tabel 2. 14 Rencana Bentuk Kegiatan Program adalah " Capacity Building atau Peningkatan Kapasitas Keluarga di RW 05 Kelurahan Sukapura melalui Program UP2K" 56
Tabel 2. 15 Sistem Partisipan Program adalah " Capacity Building atau Peningkatan Kapasitas Keluarga di RW 05 Kelurahan Sukapura melalui Program UP2K" 57
Tabel 2. 16 Alat yang dibutuhkan 58
Tabel 2. 17 Rencana Anggaran Biaya Program adalah " Capacity Building atau Peningkatan Kapasitas Keluarga di RW 05 Kelurahan Sukapura melalui Program UP2K" 58

Tabel 2. 18 Analisis Kelayakan Program adalah “ Capacity Building atau Peningkatan Kapasitas Keluarga di RW 05 Kelurahan Sukapura melalui Program UP2K” 59
Tabel 2. 19 Jadwal Kegiatan Program adalah “ Capacity Building atau Peningkatan Kapasitas Keluarga di RW 05 Kelurahan Sukapura melalui Program UP2K” 60
Tabel 2. 20 Rencana Bentuk Kegiatan Program “Peningkatan Kemampuan Pembuatan dan Perawatan Tandon Mandiri di RW 10 Kelurahan Sukapura”. 68
Tabel 2. 21 Sistem Partisipan Program “Peningkatan Kemampuan Pembuatan dan Perawatan Tandon Mandiri di RW 10 Kelurahan Sukapura”. 69
Tabel 2. 22 Alat yang dibutuhkan 70
Tabel 2. 23 Rencana Aggaran Biaya Program “Peningkatan Kemampuan Pembuatan dan Perawatan Tandon Mandiri di RW 10 Kelurahan Sukapura 71
Tabel 2. 24 Analisis SWOT Analis Penataan Lingkungan .. **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2. 25 Jadwal Program “Peningkatan Kemampuan Pembuatan dan Perawatan Tandon Mandiri di RW 10 Kelurahan Sukapura” 73
Tabel 2. 26 Pelaksanaan Program “Peningkatan Kemampuan Pembuatan dan Perawatan Tandon Mandiri di RW 10 Kelurahan Sukapura”. 74
Tabel 2. 27 Rencana Bentuk Kegiatan “Pengurangan Resiko Genangan Air Akibat Membuang Sampah Sembaranag di RT 05 Kelurahan Sukapura”. 86
Tabel 2. 28 Sistem Partisipan 86
Tabel 2. 29 Alat yang dibutuhkan 87
Tabel 2. 30 Rencana Anggaran Biaya Program “Pengurangan Resiko Genangan Air Akibat Membuang Sampah Sembaranag di RT 05 Kelurahan Sukapura”. .....**Error! Bookmark not defined.**98
Tabel 2. 31 Analisis SWOT Analis Penanggulangan Bencana.....89
Tabel 2. 32 Jadwal Pelaksanaan Program “Pengurangan Resiko Genangan Air Akibat Membuang Sampah Sembaranag di RT 05 Kelurahan Sukapura”. 90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pelepasan Mahasiswa Praktikum ke Dosen Pembimbing.....5
Gambar 2 Pelepasan Mahasiswa ke Kelurahan Sukapura 6
Gambar 3 Bimbingan Profil Analis Jaminan Sosial 7
Gambar 4 Bimbingan Analis Sumber Dana Bantuan Sosial.....9
Gambar 5 Pembekalan Analis Pemberdayaan Sosial.....11
Gambar 6 Pembekalan Analis Penataan Lingkungan Sosial 12
Gambar 7 Pembekalan Analis Penanggulangan Bencana.....13
Gambar 8 Melakukan Transect Walk 22
Gambar 9 Wawancara Bersama Puskesos Kelurahan Sukapura.....22
Gambar 10 Wawancara bersama Ketua RW 04.....23
Gambar 11 Wawancara bersama Kader PKK RW 04 24
Gambar 12 Pohon Masalah Analis Jaminan Sosial.....25
Gambar 13 Wawancara Bersama A Puskesos Kelurahan Sukapura.....40
Gambar 14 Wawancara bersama Pendamping PKH.....41
Gambar 15 Pohon Masalah Analis Sumber Dana Bansos 42
Gambar 16 Bersama Ketua Posyandu RW 05 53
Gambar 17 Pohon Masalah Analis Pemberdayaan Lingkungan.....54
Gambar 18 Praktik MPA.....64
Gambar 19 melakukan wawancara dengan Ibu F 65
Gambar 20 kondisi air di salah satu rumah warga di RW 10.....65
Gambar 21 Pohon Masalah Analis Penataan Lingkungan.....66
Gambar 22 sedang melakukan wawancara dengan Bapak B.....80
Gambar 23 Pohon Masalah Analis Penanggulangan Bencana 81
Gambar 24 koordinasi dengan pihak Kelurahan Sukapura.....96
Gambar 25 Kunjungan ke Posyandu RW 05 96
Gambar 26 Pelepasan Praktikan bersama dosen pembimbing ke pihak kelurahan sukapura 97
Gambar 27 MPA bersama PKK RW 10 97
Gambar 28 Wawancara dengan PKK RW 10.....97
Gambar 29 Pembagian Bansos Bersama Ibu PKK RW 10.....98
Gambar 30 Lokakarya Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Sukapura.....98

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pendidikan di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran dalam kelas *(classroom teaching),* tetapi juga melalui praktikum laboratorium *(laboratory practicum) indoor dan outdoor*. Kegiatan praktikum menjadi wahana bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan-keterampilan dasar dan keterampilan-keterampilan khusus dalam proses intervensi pekerjaan sosial. Dengan demikian mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam praktik aras mikro, meso, dan makro, baik dalam bekerja dengan individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi sosial. Praktikum Laboratorium disamping dilaksanakan dalam ruangan laboratorium, juga mahasiswa diberikan kesempatan melakukan aktivitas di masyarakat dan/atau organisasi sosial untuk memahami fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.

Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial menjadi bagian penting dalam membentuk profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Melalui praktikum laboratorium, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan keterampilan praktik intervensi pekerjaan sosial mulai proses awal hingga pengakhiran melalui aktivitas di dalam laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Demikian pula dalam praktikum ini dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan keterampilan dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial. Kegiatan praktikum laboratorium berfokus pada penguasaan keterampilan dasar dan keterampilan proses intervensi pekerjaan sosial dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat dan organisasi sosial.

Pelaksanaan praktikum laboratorium yang dimulai pada tanggal 6 Februari – 15 April 2023 mengenai analisis lima profil lulusan prodi. Di Kelurahan Sukapura ini praktikan menemukan berbagai isu mengenai Jaminan Sosial seperti, perbedaan nama di KK/KTP dengan kartu KIS BPJS Kesehatan sehingga masyarakat tidak dapat mengakses pelayanan, Sebagian masyarakat dalam 1 KK tidak semua mempunyai KIS, Kurangnya informasi dari kader di tingkat RT terkait bantuan KKS dan PKH sehinga terjadi mis informasi kepada warga, Masyarakat yang kerja di sektor informal (pekerj bukan penerima upah) tidak semua mendaftarkan diri sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan , Masalah pendataan peserta PKH di RW 07 dimana masyarakat ini yang seharusnya menerima PKH malah tidak menerima nya, Kurangnya informasi terkait peralihan status BPJS Kesehatan yang di tanggung perusahaan ke status

mandiri, dan yang terakhir ini praktikan mengambil isu yang terkait. Pada profil Analis Jaminan Sosial praktikan membahas terkait isu Sebagian warga Kelurahan Sukapura tidak mau mendaftarkan diri sebagai peserta KIS karena administrasi yang rumit dan pelayanan kurang maksimal. Di Analis Sumber Dana Bantuan Sosial terdapat isu mengenai program BST yang diberikan tidak tepat sasaran dan menimbulkan kecemburuan sosial antar warga dengan KPM. Di Analis Pemberdayaan Sosial menemukan isu mengenai kurangnya pengetahuan dan keterampilan Program UP2K dalam manajamen dan distribusi produk di RW 05 Kelurahan Sukapura. Di Analis Penataan Lingkungan mendapatkan isu mengenai keterbatasan mendapatkan air bersih di RW 10 Kelurahan Sukapura. Dan di Analis Penanggulan Bencana praktikan menemukan isu mengenai banyak genangan air sesudah hujan karena gorong-gorong tersumbat sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat sekitar.

B. Tujuan dan Manfaat Praktikum

Tujuan dan manfaat dari pelaksanaan Praktikum Laboratorium Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang dilakukan oleh praktikan adalah sebagai berikut :

1) Tujuan Praktikum

Praktikum Laboratorium bertujuan agar mahasiswa memiliki :

a. Sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, perbedaan agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinil orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
b. Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
c. Kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
d. Kemampuan untuk mempraktikan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
e. Memiliki keterampilan dalam melakukan proses intervensi pekerjaan sosial meliputi tahapan:
    1) Pendekatan Awal
    2) Asesmen
    3) Perencanaan Intervensi

2) Manfaat praktikum laboratorium

Bagi Mahasiswa :

a. Terbentuknya sikap mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasar agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinil orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
b. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
c. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
d. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mempraktikan keterampilanketerampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
e. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya secara nyata dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
f. Mahasiswa memiliki keterampilan praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial yang meliputi tahapan :
    a. Pendekatan Awal
    b. Asesmen
    c. Rencana Intervensi

Bagi Lembaga :

a. Meningkatnya kualitas kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
b. Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

C. Waktu dan Lokasi Praktikum

Lokasi praktikum berada di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat. Waktu pelaksanaan Praktikum Laboratorium sesuai dengan tahapan proses terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu :

1. Pra Lapangan

a. Pembekalan	: 25 Januari – 3 Februari 2023
b. Pelepasan Praktikan	: 8 Februari 2023
2. Lapangan (Indoor)	: 8 Februari - 15 April 2023
3. Pasca Lapangan	
a. Bimbingan penulisan laporan	: 16 - 26 April 2023
b. Pendaftaran ujian	: 27 – 29 April 2023
c. Ujian Lisan Praktikum	: 2-3 Mei 2023
d. Perbaikan dan penyerahan Laporan	: 3 – 10 Mei 2023

D. Proses Praktikum

Proses praktikum laboratorium dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran.

1) Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap pra lapangan yang dilaksanakan untuk menyiapkan praktikan dan dosen pembimbing praktikum dalam memahami kegiatan praktikum laboratorium. Tahap pra lapangan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Pembekalan Umum

Pembekalan umum dilaksanakan dengan pemberian materi tentang perlindungan dan jaminan sosial oleh narasumber dari Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementrian Sosial Republik Indonesia

b. Bimbingan pra lapangan oleh dosen pembimbing praktikum Ibu Dr. Decky Irianti, MP

1) Review tentang materi pembekalan umum dan penugasan melalui *Google Classroom.*
2) Bimbingan teori/konsep dan keterampilan yang akan diterapkan.
3) Melakukan Praktik, demonstrasi, role playing tentang kegiatan dan teknologi perlindungan dan pemberdayaan sosial dengan menggunakan data sekunder, dalam hal:
    a) Mengenal populasi kelompok sasaran *(population target group)* dan lingkungan sosialnya

b) Mengidentifikasi dan memahami program-program : Sistem Jaminan Sosial, Sumber Dana Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penataan Lingkungan Sosial, Penanggulangan Bencana
c) Mempelajari isu-isu masalah perlindungan dan pemberdayaan sosial yang terkait dengan 5 (lima) profil Prodi Lindayasos.
d) Mengidentifikasi kebijakan dan program/kegiatan penanganan masalah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial sesuai dengan 5 (lima) profil Prodi Lindayasos.

4) Membuat matriks rencana kerja dan desain teknologi yang sesuai dengan kegiatan praktikum laboratorium.

c. Serah terima praktikan dari Prodi kepada Dosen Pembimbing Praktikum.

Serah terima praktikan, dilaksanakan secara luring di Lapangan Poltekesos Bandung yang ditunjuk sebagai dosen pembimbing praktikum.

Gambar 1 Pelepasan Mahasiswa Praktikum ke Dosen Pembimbing

2) Tahap Pelaksanaan

Tahap lapangan dilaksanakan dalam lima sesi sesuai profil lulusan Prodi Lindayasos yaitu praktik sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Setiap

sesi dilaksanakan selama 14 hari kalender, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Gambar 2 Pelepasan Mahasiswa ke Kelurahan Sukapura

1) Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial

a. Peningkatan Kompetensi Kapasitas Analis Jaminan Sosial oleh Gayatri Waditra Nirwesti, S.Mn, MSE selaku Perencanaan Ahli Muda Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial yang dilaksanakan pada Kamis, 2 Februari 2023. Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola pelaksanaan system jaminan sosial bagi Pekerja Sektor Informal di Indonesia, yang meliputi :
   a) Kebijakan dan struktur jaminan sosial.
   b) Program jaminan sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional
   c) Kelembagaan utama penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia.
   d) Strategi dan target jaminan sosial dalam RKP 2023
   e) Karakteristik masyarakat yang menerima bantuan sosial di sektor formal dan informal.
   f) Tantangan program jaminan sosial di Indonesia : Pekerja informal di Indonesia
   g) Potensi kontribusi lulusan jaminan sosial.

b. Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Jaminan Sosial, sebagai berikut :
   a) Pengetahuan
      i. Mengetahui konsep teoritis kebutuhan dasar manusia
      ii. Memahami konsep masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial

iii. Mengetahui konsep perlindungan dan jaminan sosial
iv. Mengetahui konsep standar praktik pekerjaan sosial

b) Keterampilan
   i. Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat
   ii. Mampu dalam menganalisis dan Menyusun program perlindungan dan jaminan sosial untuk mecegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal
   iii. Mampu menganalisis dan menyusun program bantuan sosial.
   iv. Mampu menganalisis dan Menyusun program advokasi sosial
   v. Mampu menganalisis dan Menyusun program pemberian akses bantuan hukum

c) Praktik Analis Jaminan Sosial, meliputi :
   a) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial
   b) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder
   c) Menyusun Rencana Intervensi sesuai dengan kasus/permasalahan yang dipilih oleh praktikan
   d) Menyusun laporan praktik analis jaminan sosial.

Gambar 3 Bimbingan Profil Analis Jaminan Sosial

2) Peningkatan Kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

a. Peningkatan kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh Tonton Heriyanto selaku CSR Manager PT. AAPC Indonesia yang dilaksanakan pada Rabu, 22 Februari 2023. Membahas tentang Peningkatan Kompetensi Analis Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial yang meliputi :
   a) Berbagai isu dalam implementasi sumber dana bantuan sosial
   b) Model sumber dana bantuan sosial yang digunakan
   c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial,
   d) Merancang program sumber dana bantuan sosial
   e) Dimensi tujuan pembangunan berkelanjutan.
   f) Melakukan analisis kelayakan rancangan program sumber dana bantuan sosial.
   g) Manajemen sumber dana bantuan sosial
   h) Komponen dalam membangun jaringan.

b. Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Dana Bantuan Sosial, sebagai berikut :
   a) Pengetahuan
      i. Menguasai konsep bantuan sosial dan jenisnya
      ii. Menguasai konsep sumber dana bantuan sosial
      iii. Menguasai konsep penggalangan dana dan prinsip-prinsip penggalangan sumber dana bantuan sosial
      iv. Menguasai konsep perencanaan dalam penggalangan sumber dana bantuan sosial
      v. Menguasai konsep pelaksanaan dan kebijakan penggalangan sumber dana bantuan sosial
      vi. Menguasai konsep monitoring dan evaluasi dalam penggalangan sumber dana bantuan sosial
   b) Keterampilan
      i. Mampu menganalisis dan Menyusun program perencanaan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial
      ii. Mampu menganalisis dan menyusun program pelaksanaan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial
      iii. Mampu menganalisis dan menyusun program monitoring dan evaluasi dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial
      iv. Mampu menganalisis dan menyusun system pelaporan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial

v. Mampu menganalisis dan Menyusun system informasi dan komunikasi dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial

c. Praktik Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, meliputi:

a) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ masalah-masalah dalam pengelolaan dana bantuan sosial
b) Melakukan asesmen dengan menggunakan data sekunder
c) Menyusun rencana intervensi
d) Menyusun laporan praktik analis sumber dana bantuan sosial

Gambar 4 Bimbingan Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

3) Peningkatan Kompetensi Analis Pemeberdayaan Sosial

a. Peningkatan kompetensi analis Pemberdayaan Sosial oleh Samsul Maarif selaku Projek Manajer Yayasan Usaha Mulia Kab. Cianjur yang dilaksanakan pada Rabu, 8 Maret 2023. Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola Peningkatan Pemberdayaan Sosial, yang meliputi :

a) Berbagai isu dalam implementasi pemberdayaan sosial
b) Model pemberdayaan sosial yang digunakan
c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pemberdayaan sosial
d) Merancang program pemberdayaan sosial
e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program pemberdayaan sosial
f) *Stakeholder* terkait program pemberdayaan sosial.

b. Peningkatan Kompetensi Analis Pemberdayaan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Pemberdayaan Sosial, sebagai berikut :

a) Pengetahuan

i. Menguasai konsep kebutuhan individu, keluarga, kelompok, dan masyrakat dalam pemberdayaan sosial
ii. Menguasai konsep dan teknologi pemberdayaan sosial

iii. Menguasai konsep sumber daya penyelenggaraan sosial dalam pemberdayaan sosial
iv. Menguasai konsep supervise dalam program pemberdayaan sosial
v. Menguasai konsep pendampingan sosial dan penguatan kelembangaan sosial dalam pemberdayaan sosial
vi. Menguasai konsep keserasian sosial dan pemasaran hasil usaha dalam pemberdayaan sosial

b) Keterampilan
i. Mampu mengidentfifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan dalam pemberdayaan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
ii. Mampu menganalisis dan Menyusun program penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi dalam pemberdayaan sosial
iii. Mampu menganalisis dan menyusun program pemberian keterampilan dalam pemberdayaan sosial
iv. Mampu menganalisis dan menyusun program penguatan kelembagaan dalam masyarakat dalam pemberdayaan sosial
v. Mampu melaksanakan program pendampingan sosial untuk pemberdayaan sosial
vi. Mampu menganalisis dan menyusun program kemitraan dan penggalangan dana untuk pemberdayaan sosial
vii. Mampu melaksanakan pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha
viii. Mampu melaksanakan peningkatan akses pemasaran hasil usaha
ix. Mampu melaksanakan supervisi dan advokasi sosial dalam pemberdayaan sosial
x. Mampu menganalisis dan menyusun program keserasian sosial dan bimbingan lanjut dalam pemberdayaan sosial

c. Praktik Analis Pemberdayaan Sosial, meliputi :
a) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ masalah-masalah dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial
b) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder
c) Menyusun Rencana Intervensi
d) Menyusun laporan praktik analis pemberdayaan sosial

Gambar 5 Pembekalan Analis Pemberdayaan Sosial

4) Peningkatan Kompetensi Analis Penataan Lingkungan Sosial

a. Peningkatan Kompetensi Analis Penata Lingkungan oleh Ade Reno, AKS,. MSW Deputy 1 CEO, Islamic Relief Indonesia yang dilaksanakan pada Jumat, 24 Maret 2023 membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola Penataan Lingkungan Sosial, yang meliputi:
   a) Berbagai isu dalam mengelola penataan lingkungan sosial
   b) Model penataan lingkungan sosial yang digunakan
   c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam penataan lingkungan sosial
   d) Merancang program penataan lingkungan sosial
   e) Melakukan analis kelayakan rancangan program penataan lingkungan sosial
   f) Stakeholder terkait program Penataan Lingkungan Sosial

b. Peningkatan Kompetensi Analis penataan lingkungan sosial oleh dosen Prodi Lindayasos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Penataan Lingkungan Sosial, sebagai berikut:

a) Pengetahuan
   i. Menguasai Konsep ekologi manusia dalam lingkungan sosial
   ii. Menguasai Konsep krisis lingkungan, konflik sosial, dan urbanisasi
   iii. Menguasai Konsep degradasi lingkungan dan bencana alam
   iv. Menguasai Konsep adaptasi ekologi manusia
   v. Menguasai Konsep interaksi sosial-ekologi dalam suatu sistem sosial komunitas dan ekosistem
   vi. Menguasai Konsep kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam
   vii. Menguasai Konsep praktik pekerjaan sosial dalam penataan lingkungan sosial

b) Keterampilan
   i. Mampu menganalisis hubungan permasalahan lingkungan dengan munculnya masalah sosial
   ii. Mampu menganalisis dan menyusun program pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam

iii. Mampu menganalisis dan menyusun program penataan lingkungan sosial dalam peningkatan keberfungsian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat

c. Praktik Analis Penataan Lingkungan Sosial, meliputi :

a) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ masalah-masalah dalam penataan lingkungan sosial
b) Assesmen dengan menggunakan data sekunder
c) Menyusun Rencana Intervensi
d) Menyusun laporan praktik Analis Penataan Lingkungan Sosial

Gambar 6 Pembekalan Analis Penataan Lingkungan Sosial

5) Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana

a. Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana oleh Mohd Robi Amri perencana ahli madya BNPB Jakarta, yang dilaksanakan pada Rabu 5 April 2023 membahas tentang pengalaman praktisi dalam penanggulangan bencana, yang meliputi:
   a) Berbagai isu dalam penanggulangan bencana
   b) Model penanggulangan bencana yang digunakan
   c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam penanggulangan bencana
   d) Merancang program penanggulangan bencana
   e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program penanggulangan bencana
   f) Stakeholder terkait program penanggulangan bencana

b. Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana oleh dosen yang ditugaskan, dengan materi mengacu pada kompetensi Profil Analis Penanggulangan Bencana, sebagai berikut:

a) Pengetahuan
   i. Menguasai Konsep bencana alam dan non alam serta jenis-jenisnya

ii. Menguasai Konsep masalah bencana dan sistem penanggulangan bencana
iii. Menguasai Konsep mitigasi bencana, dan pengurangan risiko bencana.
iv. Menguasai Konsep perlindungan korban bencana pada saat status darurat bencana
v. Menguasai Konsep standar minimum pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

b) Keterampilan
i. Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk pengurangan risiko bencana
ii. Mampu menganalisis dan menyusun program perlindungan korban pada saat status darurat bencana
iii. Mampu menganalisis pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan pengungsi
iv. Mampu menganalisis dan menyusun program pemberdayaan korban bencana pasca bencana
v. Mampu menganalisis dan menyusun program pengembangan masyarakat resilien terhadap bencana

c. Praktik Analis Penanggulangan Bencana, meliputi :

a) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ masalah-masalah dalam penanggulangan bencana
b) Melakukan Assesmen, dengan menggunakan data sekunder
c) Menyusun Rencana Intervensi
d) Menyusun laporan praktik penanggulangan bencana

Gambar 7 Pembekalan Analis Penanggulangan Bencana

3) Tahap Pasca Lapangan

Tahap pasca lapangan merupakan tahap pengakhiran dalam Praktikum Laboratorium. Dalam tahap ini terdapat finalisasi penyusunan

laporan aktif praktikum, ujian lisan praktikum, serta perbaikan dan penyerahan laporan. Dimana mahasiswa akan mempresentasikan hasil praktikum selama di lapangan sebagai bentuk pertanggungjawaban praktikan dalam menerapkan teknologi pekerjaan sosial di lapangan.

E. Sistematika Laporan

Output dari kegiatan Praktikum Laboratorium ini adalah berupa laporan akhir praktikum. Laporan akhir praktikum dibuat dan diperiksa pada setiap tahap perkembangan praktikum yang mengacu pada kolom hasil-hasil yang diharapkan pada bagian tugas praktikan.

Berikut ini sistematika laporan akhir individu Praktikum Laboratorium Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Tahun 2023 dimana sistematika laporan ini akan digunakan oleh praktikan sebagai panduan dalam menyusun laporan akhir praktikum.

I. PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan berisi penjelasan tentang sub bab latar belakang, tujuan dan manfaat praktikum, waktu dan lokasi praktikum, proses praktikum, dan sistematika praktikum.

II. PRAKTIKUM LABORATORIUM

Dalam bab praktikum laboratorium berisi penjelasan tentang sub bab profil analis jaminan sosial, profil analis sumber dana bantuan sosial, analis pemberdayaan sosial, analis penataan lingkungan sosial, dan analis penanggulangan bencana.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam bab kesimpulan dan rekomendasi berisi penjelasan tentang sub bab kesimpulan hasil praktikum dan rekomendasi.

II. PRAKTIKUM LABORATORIUM

A. Profil Analis Jaminan Sosial

1. Gambaran Umum Masalah

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Indeks pembangunan manusia meletakkan kesehatan. Kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain Pendidikan dan pendapatan. Kondisi umum Kesehatan di Indonesia dipengaruhi oleh factor lingkungan, perilaku, dan pelayanan Kesehatan. Sementara itu, pelayanan Kesehatan terdiri dari beberapa komponen antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas Kesehatan, obat dan perbekalan Kesehatan, tenaga Kesehatan, pembiayaan dan manajemen Kesehatan. Fasilitas pelayanan Kesehatan dasar, yaitu Puskesmas. Puskesmas telah didirikan di hampir seluruh wilayah Indonesia, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan Kesehatan masih menjadi kendala.

Penyedia payung hukum diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Penyedia payung hukum merupakan upaya pemerintah dalam upaya menciptakan kesehatan yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kesehatan untuk lebih baik, selain itu pemerintah juga sudah memberikan Jaminan Sosial dalam bentuk Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam Badan Penyelengara Jaminan Kesehatan (BPJS) terbagi menjadi dua yaitu; BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaminan sosial yang diperkenalkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

Per Februari 2022 di Indonesia sudah memberikan bantuan sebesar 236,8 juta jiwa atau sekitar 86% peserta JKN-KIS dari total jumlah penduduk Indonesia. Awal Juni 2022 di Kota Bandung sendiri jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan berjumlah 2,4 juta jiwa . BPJS Kesehatan Kota Bandung mencatat 1 Juni 2022 jumlah peserta JKN-KIS di Kota Bandung sebanyak 2.476.184 jiwa atau 97,96 persen dari total penduduk.

Di kelurahan Sukapura ini terdapat beberapa masalah mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan terutama pada fasilitas pelayanan kesehatannya. Karena sebagian warga mengatakan bahwa dirinya tidak mau mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN-KIS karena administrasi yang rumit. Dalam hal ini, praktikan perlu adanya tindakan lebih lanjut mengenai warga tidak mau mendaftarkan dirinya sebagai peserta KIS karena administrasi yang rumit dan pelayanan yang kurang maksimal.

2. Tinjauan Konsep/Teori yang Relevan dengan Masalah

A. Perlindungan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Menurut International Labour Organization (ILO) Perlindungan Sosial merupakan bagian dari kebijakan sosial yang dirancang untuk menjamin kondisi keamanan pendapatan serta akses dalam layanan sosial bagi semua orang, dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang memiliki kerentanan, serta melindungi dan memberdayakan masyarakat dalam semua siklus kehidupan. (International Labour Organization, 2012).

Dinyatakan oleh Asian Development Bank (ADB) yang dikutip oleh Habibullah, menjelaskan bahwa:

> "Perlindungan sosial pada dasarnya merupakan sekumpulan kebijakan dan program yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri mereka dari bencana dan kehilangan pendapatan. Perlindungan sosial merupakan sarana penting untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan yang dihadapi oleh kelompok miskin.(Habibullah, 2017: 3)

Dinyatakan oleh Asian Development Bank (ADB) yang dikutip oleh Habibullah, menjelaskan bahwa:

> "Perlindungan sosial pada dasarnya merupakan sekumpulan kebijakan dan program yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri mereka dari bencana dan kehilangan pendapatan. Perlindungan sosial merupakan sarana penting untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan yang dihadapi oleh kelompok miskin.(Habibullah, 2017: 3)

Sehingga dengan adanya perlindungan sosial, masyarakat miskin juga mampu berdaya dan terlindungi dari risiko-risiko kerentanan.

B. Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Penyelenggaraan progam jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H bahwa: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat".

Menurut ILO (1952 : 102), jaminan sosial didefinisikan sebagai perlindungan yang diberikan masyarakat untuk para anggotanya melalui seperangkat instrument public, terhadap kesulitan ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh karena terhentinya atau turunnya penghasilan diakibatkan oleh sakit, hamil, kecelakaan kerja, pengangguran, cacat, hari tua, dan kematian.

Menurut UU No 40 Tahun 2004 jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. UU 11 tahun 2009 Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatuterlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Jaminan Sosial merupakan bagian dari Perlindungan Sosial , yaitu menurut Asian Development Bank (ADB), Perlindungan sosial adalah Sekumpulan kebijakan dan program yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri mereka dari bencana dan kehilangan pendapatan.

C. Konsep Kesehatan

1. Pengertian Kesehatan

   Menurut UU No.23 tahun 1992, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk tetap produktif secara sosial dan ekonomis.

2. Dasar Hukum Kesehatan

   a) Undang-Undang Dasar 1945 mengamatkan bahwa Kesehatan sebagai salah satu dari hak asasi manusia, dimana pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup dan sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Dalam pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

   b) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap ketersediaan informasi Kesehatan, serta layanan Kesehatan sehingga dapat meningkatkan dan memelihara derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

D. Konsep BPJS Kesehatan

1) Pengertian BPJS Kesehatan

   BPJS Kesehatan adalah badan hukum public yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan Kesehatan sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jaminan Kesehata menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu jaminan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan

tujuan menjamin agar seluruh rakyat Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan Kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan. Kehadiran BPJS Kesehatan memiliki peran sentral dalam mewujudkan system jaminan sosial nasional bidang Kesehatan. Hal ini mengingat bahwa BPJS Kesehatan, secara mendasar melakukan pembenahan terhadap system pembiayaan Kesehatan yang saat ini masih didominasi oleh *out of pocket payment*, mengarah kepada system pembiayaan yang lebih tertata berbasiskan asuransi Kesehatan sosial.

2) Visi dan Misi BPJS Kesehatan
   a) Visi BPJS Kesehatan
      Terwujudnya Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019 berlandaskan gotong royong yang berkeadilan melaui BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpecaya.
   b) Misi BPJS Kesehatan
      1. Meningkatkan kualitas layanan yang berekeadilan kepada peserta, pemberi layanan Kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya melalui system kerja yang efektif dan efisien.
      2. Memperluas kepesertaan JKN-KIS mencakup seluruh Indonesia paling lambat 1 Januari 2019 melalui peningkatan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan kepatuhan kepesertaan.
      3. Menjaga kesinambungan program JKN-KIS dengan mengoptimalkan kolektibiltas iuran, sistem pembayaran fasilitas kesehatan dan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.
3) Dasar Hukum BPJS Kesehatan
   a) Undang-Undang Dasar 1945
   b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
   c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
4) Jenis BPJS Kesehatan

   Seperti telah disinggung di atas tentang salah satu program BPJS adalah asuransi di bidang kesehatan, atau biasa disebut Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dasar hukum penyelenggaraannya yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan keanggotaan peserta ditandai dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS), termasuk bagi mereka penerima bantuan iuran dari pemerintah (PBI).

   JKN memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif melalui rujukan berjenjang tergantung pada indikasi medis pasien. Adapun manfaat yang diberikan oleh keanggotaan BPJS adalah sebagai berikut;

   a. Mendapatkan penyuluhan kesehatan mengenai perilaku hidup sehat maupun pengelolaan lingkungan hidup.

b. Hak tiap anak peserta BPJS adalah mendapatkan imunisasi dasar yang meliputi BCG, DPT-HB, campak, dan polio.
c. Memperoleh layanan KB seperti kontrasepsi, konseling kandungan, hingga tubektomi dan vasektomi
d. Pemeriksaan untuk gagal ginjal, kanker, hingga bedah jantung.
e. Skrining kesehatan menurut risiko penyakit atau dampak lanjutan. Umumnya, peserta BPJS mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama baik berupa rawat inap intensif atau non-intensif, maupun rujukan lanjutan berupa rawat jalan atau inap. Namun, perbedaannya terletak pada kelas-kelas yang diambil masyarakat.

E. KIS (Kartu Indonesia Sehat)

KIS atau Kartu Indonesia Sehat merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka memberikan bantuan kepada keluarga yang kurang mampu. Bantuan ini berupa layanan Kesehatan gratis di Puskesmas, Klinik, hingga rumah sakit di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan penyakit yang di deritanya.

Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.

a. Sasaran KIS

Merujuk situs resmi BPJS Kesehatan, KIS diprioritaskan khusus untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti masyarakat fakir miskin dan tidak mampu secara ekonomi. Sementara untuk peserta BPJS Kesehatan diwajibkan bagi masyarakat Indonesia tanpa memandang miskin atau kaya. Ketentuan ini bertujuan agar setiap orang memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan Kesehatan.

Dengan demikian, kepesertaan program JKN-KIS ini digolongkan kedalam dua kelompok, yaitu :

1) Kelompok masyarakat yang wajib mendaftar dan membayar iuran, baik yang membayar sendiri maupun berkontribusi Bersama pemberi kerja.
2) Kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu didaftarkan dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah.

b. Tujuan KIS

Program JKN-KIS bertujuan memberikan perlindungan kepada setiap peserta program JKN-KIS untuk mendapatkan kepastian jaminan kesehatan sehingga diharapkan masyarakat bisa meningkat produktifitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Protection

merupakan perlindungan baik untuk diri sendiri, keluarga maupun orang lain.

c. Iuran peserta KIS

Lantaran sasaran peserta KIS merupakan kalangan fakir miskin dan tidak mampu, maka tidak dipungut biaya sama sekali karena iurannya disubsidi oleh pemerintah. Lain halnya dengan peserta BPJS Kesehatan yang dikenakan iuran bulanan sesuai dengan jumlah yang sudah di tentukan.

d. Prosedur dan Fasilitas Layanan Kesehatan peserta KIS

KIS dapat digunakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Faskes I) mana pun seperti puskesmas, klinik kesehatan, dokter umum, dan rumah sakit di seluruh Indonesia.,Pemegang KIS juga berhak mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKRTL) seperti rumah sakit setelah mendapatkan rujukan dari Faskes I. Sedangkan BPJS Kesehatan berlaku di puskesmas dan faskes tingkat pertama yang sudah terdaftar. Nantinya jika memerlukan perawatan lanjutan, akan diberi surat rujukan untuk dapat ke rumah sakit.

3. Asesmen

Praktikum laboratorium pada isu jaminan sosial dilakukan pada tanggal 8 Februari hingga 22 Februari 2023. Praktikan memilih isu terkait peserta KIS di Kelurahan Sukapura dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara. Kemudian praktikan menggunakan data sekunder melalui internet seperti website resmi BPJS Kesehatan, Kementrian Sosial, dirjen Linjamsos. Teknologi asesmen yang digunakan dengan Analisis Pohon Masalah. Analisis Pohon Masalah adalah suatu metode untuk mengidentifikasi semua masalah dalam situasi tertentu dan memperagakannya sebagai rangkaian hubungan sebab akibat. Penyusunan analisis pohon masalah membantu untuk menemukan solusi dengan memetakan sebab akibat disekitar masalah utama untuk membentuk pola pikir lebih terstruktur. Praktikan menemukan beberapa masalah/isu yang ada di lingkungan Sukapura ini yaitu perbedaan nama di KK/KTP dengan kartu KIS BPJS Kesehatan sehingga masyarakat tidak dapat mengakses pelayanan, Sebagian masyarakat belum memiliki KIS (dalam 1 KK tidak semua punya KIS), Kurangnya informasi dari kader di tingkat RT terkait bantuan KIS dan PKH sehingga terjadi mis informasi kepada warga, Masyarakat yang kerja di sektor informal (pekerja bukan penerima upah) tidak semua mendaftarkan diri sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan, Kurangnya informasi terkait peralihan status BPJS Kesehatan yang ditanggung perusahaan ke status mandiri, dan Sebagian warga tidak mau mendaftarkan dirinya sebagai peserta KIS karena administrasi yang rumit dan pelayanan yang kurang maksimal. Dari banyaknya isu yang sudah disebutkan

diatas, maka praktikan hanya fokus ke salah satu isu saja. Yaitu mengenai "Sebagian warga tidak mau mendaftarkan dirinya sebagai peserta KIS karena administrasi yang rumit dan pelayanan yang kurang maksimal". Praktikan memilih isu tersebut karena program KIS ini kesempatan besar untuk warga yang tidak mampu untuk memeriksakan kesehatannya secara gratis.

a. Identifikasi Masalah

Kelurahan Sukapura merupakan sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung. Dengan luas wilayah sekitar 108,72 Ha yang terbagi kedalam 15 RW dan 109 RT. Total jumlah penduduk Kelurahan Sukapura sebanyak 27.858 jiwa pada akhir bulan Desember 2016. Mobilitas penduduk di Kelurahan Sukapura sangatlah cepat mengingat aksebilitas dan letak geografis yang memiliki potensi industri dan banyak potensi ekonomi di bidang perdagangan, sehingga Kelurahan Sukapura pun tidak luput dari permasalahan sosial. Dimana kepadatan penduduk di Kelurahan Sukapura berjalan beriringan dengan timbulnya permasalahan sosial disana.

Jumlah 15 RW yang ada di Kelurahan Sukapura ini akan dibagi kembali per anggota kelompoknya. Tiap anggota memegang atau menganalisis 2 RW saja untuk melakukan obeservasi selama praktikum. Kegiatan yang dilakukan pada tanggal 8 Februari 2023 yaitu melakukan penjajakan atau *transect walk* ke setiap RW nya. Saya sebagai praktikan hanya fokus melakukan penjajakan di RW 1, 2, 3, dan 4 saja. Selama penjajakan praktikan mendapatkan hasil kondisi keadaan yang ada di lingkungan tersebut, yaitu :

1) RW 01 : Keadaan lingkungan di RW 01 akses jalannya yang rusak/banyak jalan yang berlubang, untuk keadaan tiap rumahnya tidak terlalu padat dan mayoritas rumahnya sudah bagus.
2) RW 02 : Akses untuk jalan rata-rata gangnya sempit/ hanya bisa masuk satu motor saja, tetapi sepanjang jalan di RW 02 ini sudah bagus atau jarang ada jalan yang berlubang.
3) RW 03 : Akses untuk jalan gangnya sempit dan keadaan rumah penduduknya sangat padat.
4) RW 04 : Keadaan di lingkungan RW 04 ini banyak sampah yang berserakan, keadaannya gersang karena berdekatan dengan rel kereta, terdapat sungai yang tidak terurus karena banyak sampah, sehingga terlihat kumuh, sangat padat penduduk, dan jalannya agak rusak.

Gambar 8 Melakukan Transect Walk

Berdasarkan hasil *transect walk* yang sudah dilakukan, selanjutnya saya melakukan wawancara yang dilakukan bersama Ibu Y selaku Puskesos Kelurahan Sukapura ditemukan permasalahan, yaitu :

(1) Sebagian warga yang masih menganggap dirinya belum butuh jaminan kesehatan dikarenakan masih keadaan sehat atau tidak sakit.
(2) Adanya warga yang mendaftarkan diri ikut kepesertaan BPJS Kesehatan dikarenakan perlu di waktu itu saja. Hal tersebut dikarenakan mereka belum memahami sistem penyelenggaran BPJS Kesehatan sehingga terjadi salah persepsi terhadap pembayaran iuran yang ada.
(3) Adanya warga yang masih belum memahami adanya program jaminan kesehatan yang telah di selenggarakan oleh pemerintah. Sehingga banyak warga yang apabila sakit merasa berat dan sangat terbebani dengan biaya yang harus dibayarkan.
(4) Sebagian warga tidak mau mendaftarkan dirinya sebagai peserta KIS karena administrasi yang rumit dan pelayanan yang kurang maksimal.

Gambar 9 Wawancara Bersama Puskesos Kelurahan Sukapura

Setelah melakukan wawancara dengan Ibu Y selaku Puskesos Kelurahan Sukapura ini, kami melanjutkan wawancara kembali dengan ketua RW 04 mengenai masalah Jaminan Sosial yang ada di Lingkungan RW 04 ini. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 9 Februari 2023 pada pukul 13.35 WIB di rumah atau tempat tinggal ketua RW 04 ini. Permasalahan yang ada di RW 04 ini yang paling mencolok yaitu mengenai *Drainase* dan Kemiskinan. Di RW 04 ini banyak warga yang mendapatkan bantuan sosial dari program pemerintah yaitu PKH dan KIP. Untuk sasaran di RW 04 ini lansia dan keluarga yang memiliki tanggungan anak sekolah tetapi tidak mampu untuk menyekolahkannya. Untuk warga yang ingin mendapatkan bantuan tersebut harus mendaftarkan diri, lalu selanjutnya akan diseleksi dan ada petugas yang turun ke lapangan untuk *survei* atau memfotokan keadaan rumah warga tersebut apakah warga ini layak untuk diberikan bantuan atau tidaknya. Di RW 04 ini rata-rata bantuan sosial ini seperti PKH dan KKS/KIP ada pengurusnya tersendiri dan tidak dipegang oleh RT/RW. Untuk organisasi masyarakat di RW 04 ini ada Karang Taruna dan PKK. Untuk Karang Taruna di RW 04 ini tidak terlalu aktif sedangkan PKK di RW 04 terbilang sangat aktif karena selalu ada kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK. Sistem pelayanan yang mudah dijangkau di RW 04 adalah Posyandu. Sedangkan untuk Puskesmas susah untuk dijangkau.

Gambar 10 Wawancara bersama Ketua RW 04

Selanjutnya praktikan melalukan *transecwalk* kembali ke lingkungan RW 03 pada tanggal 10 Februari 2023. Setelah melakukan *transectwalk*, keadaan di RW 03 ini kondisi lingkungannya bersih, selama melakukan *transectwalk* ini kami jarang melihat ada sampah yang berserakan di jalanan meskipun untuk akses jalan ke RW 03 ini gangnya sempit dan ada beberapa tempat yang terlihat kumuh. Dan di RW 03 ini banyak pedagang sektor informal.

Setelah melakukan transectwalk, kami juga melakukan wawancara dengan salah satu warga sekaligus pedagang yang ada di RW 03 tersebut dan mendapati informasi. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 15 Februari 2023. Hasil wawancara ini terdapat informasi mengenai banyak masyarakat yang terdaftar dalam KKS dan diberi bantuan dari Pemerintah berupa PKH, BPNT dan KIS. Ada masyarakat yang telah terdaftar PKH tetapi anaknya tidak dapat dari sekolah. Masih sulit mendapat informasi dari pihak RW 03 ini, jadinya warga harus mencari dan mengurusnya sendiri.

Di tanggal yang sama, setelah melakukan wawancara dengan salah satu warga RW 03 ini kami melanjutkan wawancara kembali dengan salah satu warga yang ada di RW 04. Hasil dari wawancara tersebut yaitu banyak masyarakat yang tidak terdaftar KKS karena malas mengurusinya padahal mereka termasuk golongan yang memerlukan bantuan. Sedangkan pihak RW 04 ini sudah sering melakukan sosialisasi mengenai bantuan ini.

Pada tanggal 16 Februari 2023 pukul 11.32 WIB di rumah Ibu E selaku kader PKK RW 04, kami melakukan wawancara dan mendapati informasi bahwa di RW 04 ini program Jaminan Sosial yang paling banyak didapati yaitu BPJS, PBI, PKH, dan BPNT. Kebanyakan sasarannya yaitu Lansia dan keluarga yang memiliki tanggungan anak sekolah. Unruk kendala di RW 04 ini pada data DTKS yang susah. Untuk sumber dana ormas di RW 04 ini selain dari Pemerintah yaitu ada arisan dan iuran warga. Ormas yang aktif selain PKK di RW 04 ini ada Karang Taruna, walaupun aktifnya saat akan menjelang 17 Agustusan. Selain itu, masalah lingkungan yang ada di RW 04 ini saluran air nya selalu terhambat dan menimbulkan banjir. Untuk penanganan masalah tersebut Pemerintah lambat untuk menanganinya.

Gambar 11 Wawancara bersama Kader PKK RW 04

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai identifikasi masalah yang ada pada Kelurahan Sukapura ini, praktikan dapat menjelaskan disini melalui analisi pohon masalah sebagai berikut.

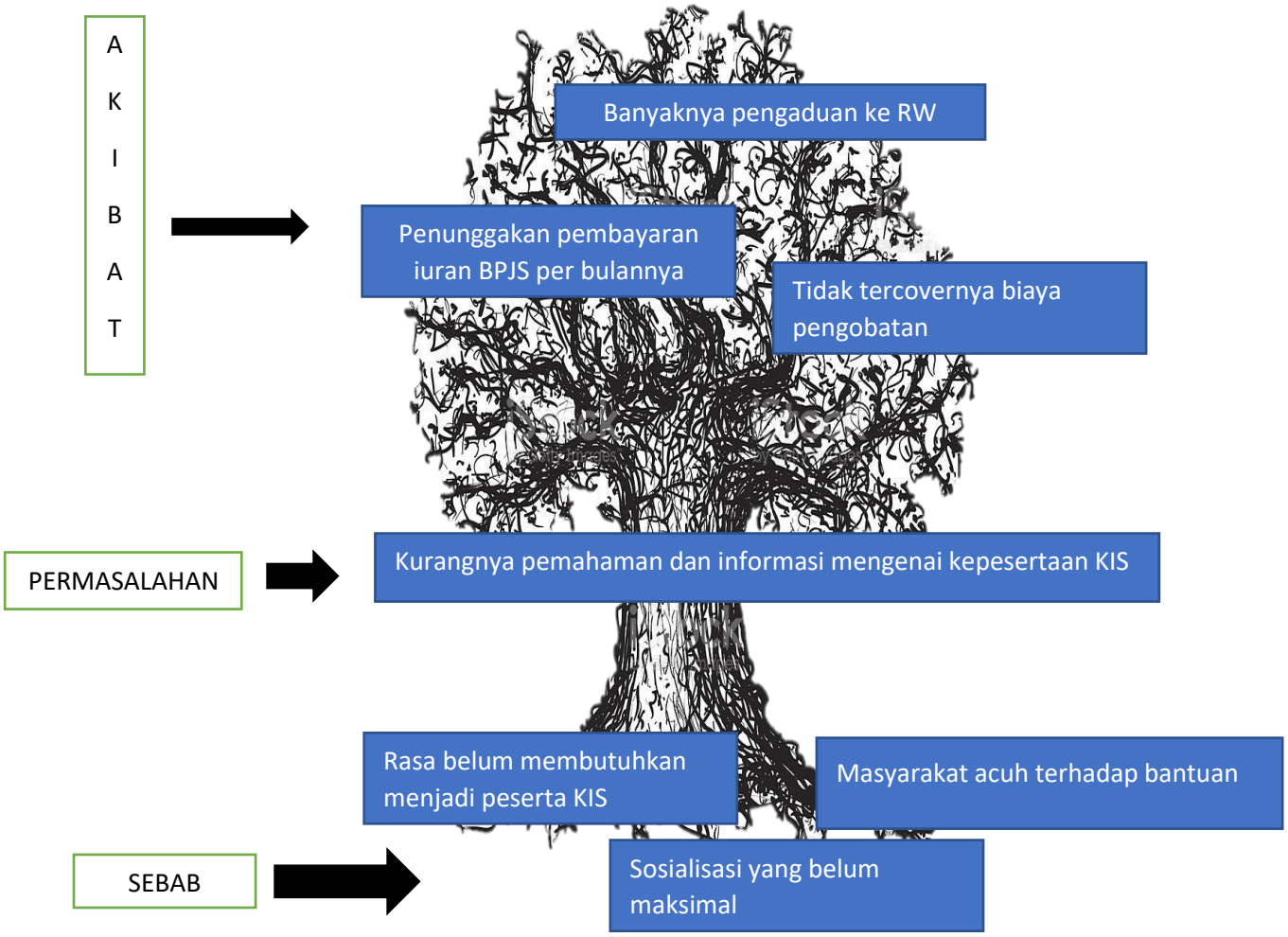

Gambar 12 Pohon Masalah Analis Jaminan Sosial

1) Penyebab Masalah

Dari hasil analisis pohon masalah, dapat disimpulkan beberapa penyebab masalah sebagai beikut.

a. Sosialisasi terkait program KIS masih belum optimal. Hal tersebut berkaitan dengan penyebaran informasi yang di dapat oleh warga terkait KIS belum optimal karena sosialisasi hanya dilakukan di awal program tersebut ada.

b. Masyarakat acuh terhadap bantuan dari Pemerintah. Masih ada masyarakat acuh terhadap bantuan dari Pemerintah padahal sangat

membutuhkan bantuan tersebut dan warga tidak mau sabar mengurus administrasi yang katanya rumit dan pelayanan yang rumit.

c. Rasa belum membutuhkan pelayanan kesehatan. Masih terdapat beberapa warga yang menganggap dirinya selalu sehat sehingga tidak memikirkan jangka waktu kedepannya.

2) Dampak Masalah

a. Terjadi pengaduan ke pihak kelurahan. Dengan adanya masyarakat yang masih belum memiliki Jaminan Kesehatan yang telah disediakan oleh Pemerintah dan kurangnya pengetahuan banyak warga yang mengeluhkan hal tersebut ke kelurahan dan berharap kelurahan dapat segera menyelesaikan.

b. Terjadinya penunggakan pembayaran iuran wajib per bulan atau premi. Apabila terjadi keterlambatan informasi yang di dapat warga maka akan terjadi pula penunggakan pembayaran per bulanya.

c. Tidak dapat digunakan saat dibutuhkan dalam waktu tertentu. Jika BPJS dibutuhkan dalam keadaan darurat atau urgent maka tidak dapat digunakan karena masih ada tunggakan sehingga biaya tidak tercover.

3) Fokus Masalah

Berdasarkan hasil asesmen maka prioritas permasalahan yang dipilih adalah sebagian warga tidak mau mendaftarkan dirinya sebagai peserta KIS karena administrasi yang rumit dan pelayanan kurang maksimal.

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan fokus masalah, identifikasi kebutuhan yang diperlukan sesuai permasalahan yang ada adalah :

1) Meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.
2) Memberikan pemahaman tentang kepesertaan KIS
3) Pemberian informasi mengenai akibat apabila tidak mendaftarkan dirinya sebagai peserta KIS

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Berdasarkan identifikasi kebutuhan, potensi dan sumber yang diperlukan sesuai permasalahan yang ada adalah :

1) PKK (Penggerak dan Kesejahteraan Keluarga)

Penggerak dan Kesejahteraan Keluarga adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintah untuk terlaksananya program PKK tersebut. PKK di Kelurahan Sukapura tergolong aktif dengan menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan penyuluh. PKK di Kelurahan Sukapura juga selalu mengadakan program pokok seperti gotong royong, sandang, pangan, kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat, penghayatan dan

pengamalan pancasila, perumahan dan taat laksanan rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, dan pengembangan kehidupan beroperasi.

2) Dinas Sosial Kota Bandung

Dinas Sosial dalam pelaksanaan rencana intervensi berperan sebagai fasilitator dan *support system* dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

3) Kader BPJS Kesehatan Kelurahan Sukapura

Kader BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan rencana intervensi berperan sebagai edukator dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait alur administrasi dan manfaat KIS serta sebagai broker antara pihak Kelurahan Sukapura denga BPJS Kesehatan.

4) Pelayanan Kesehatan di Kelurahan Sukapura

Di Kelurahan Sukapura terdapat pelayanan kesehatan dan beberapa Poliklinik, dan praktek dokter. Selain itu juga terdapat pelayanan skala besar yaitu RSUD yang berada di wilayah Kelurahan Sukapura. Adapun terdapat sarana dan prasarana yang dapat digunakan masyarakat yaitu :

Tabel 2. 1 Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukapura

No	Jenis	Jumlah
1.	Sekolah	19
2.	Rumah sakit	1
3.	Dokter umum	2
4.	Klinik	2
5.	Apotik	2
6.	Posyandu	20
7.	Masjid	30
8.	Taman	2
9.	Lapangan	19

4. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Penanganan Kesehatan merupakan tugas dan tanggung jawab Menteri Kesehatan. Tanggung jawab tersebut dapat berupa Jaminan. Jaminan Kesehatan adalah adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Pemhaman dan informasi mengenai seluruh hal yang berkaitan dengan program bantuan merupakan tanggungjawab seluruh sumber daya manusia yang bersangkutan dalam penyelenggaraan jaminan sosia di bidang kesehatan mulai dari struktur paling bawah hingga keatas. Sehingga perlu adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat yang masuk kedalam kategori PMKS dan terdata dalam DTKS terkait tujuan dan manfaat dari KIS sehingga mereka bisa mengakses layanan kesehatan secara gratis. Maka dari itu perlu diadakannya sosialisasi. Sosialisasi ini terkait pelaksanaan program BPJS Kesehatan. Isi materi mengenai alur pendaftaran kepesertaan,

b. Tujuan Umum dan Khusus

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan KPM terkait Kartu Indonesia Sehat. Adapun tujuan umum dari kegiatan ini, antara lain:

1) Tujuan Umum

   Tujuan umum dari program menangani masalah BPJS Kesehatan di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong yaitu untuk meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

2) Tujuan Khusus

   a) Meningkat kesadaran warga untuk mendaftarkan diri kepesertaan KIS
   b) Berkurangnya pengaduan kendala kepesertaan dari warga.

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Berdasarkan analisis masalah yang telah dirumuskan diadakan sosialisasi dan edukasi. Maka program yang akan dilaksanakan adalah “ Sosialisasi Peningkatan Pemahaman terkait mekanisme Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung.” Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi warga untuk melaksanakan mekanisme sesuai peraturan dan membahas terkait tujuan dan sasaran pelaksanaan program KIS, serta hak dan kewajiban peserta KIS.

Tabel 2. 2 Tabel Rencana Bentuk Kegiatan Program, " Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Terkait Mekanisme Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung".

Kegiatan Penyelesaian Masalah	Sasaran	Tujuan	Pelaksana	PJ	Jadwal Kerja	Sumber biaya
Sosialiasi terkait pengenalan Program Kartu Indonesia Sehat	Warga Kelurahan Sukapura	Meningkatnya pengetahuan warga Kelurahan Sukapura terkait iuran BPJS Kesehatan dan KIS	BPJS Kesehatan	Kepala Lurah	1 hari	Kelurahan Sukapura

d. Sistem Partisipan

Tabel 2. 3 Sistem Program, "Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Terkait Mekanisme Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung".

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Initiator System	Pekerja Sosial
2.	Change Agent System	Pekerja Sosial
3.	Client System	Warga Kelurahan Sukapura
4.	Support System	1. Dinas Sosial Kota Bandung 2. BPJS Kesehatan
5.	Controlling System	Dinas Sosial Kota Bandung
6.	Implementing System	1. Kelompok PKK 2. Kader BPJS Kesehatam
7.	Target System	Masyarakat RW 09 dan RW 13 yang belum memiliki KIS
8.	Action System	Kelompok PKK dan Kader BPJS Kesehatan

e. Metode dan Teknik

Metode yang digunakan praktikan selama melaksanakan proses intervensi terhadap permasalahan yang ada adalah Pengembangan Masyarakat *(Community Development)* atau Pengembangan Organnisasi *(Community Organization). COCD* adalah suatu proses untuk memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat atau suatu bidang tertentu.

Adapun beberapa teknik yang digunakan praktikan ialah:

1) Penyuluhan sosial.
   Penyuluhan sosial adalah kegiatan yang dimaksudkan sebagi gerak dasar dan awal untuk bisa lebih memberikan kesiapan dan manfaat program bagi warga sasaran yang ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan, kepercayaan dan keyakinan akan perubahan serta kesadaran dari warga sasaran agar memiliki rasa tanggungjawan penuh dalam diri sendiri.
2) *Focus Group Discussion* atau Diskusi Kelompok Terfokus
   Teknik ini berupa diskusi antara beberapa orang untuk membicarakan hal-hal bersifat khusus secara mendalam. Tujuannya untuk memperoleh gambaran terhadap suatu masalah tertentu dengan lebih rinci.
3) Monitoring dan Evaluasi
   Monitoring merupakan kegiatan pemantauan terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan atau perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai dampak kegiatan yang telah diterapkan. Evaluasi ini dilakukan baik selama proses kegiatan maupun pada akhir program. Tujuan dari monitoring dan evaluasi ini yaitu untuk umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, serta untuk mengetahui kesenjangan antara perencanaan dan target.

f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan

1) Alat
   Adapun alat yang diperlukan dalam pelaksanaan rencana intervensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Alat yang Dibutuhkan Dalam Program "Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Terkait Mekanisme Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung".

No	Alat	Jumlah
1	Laptop	3
2	Kursi	50
3	Meja	4
4	Alat Tulis	15
5	Kamera	2
6	Sound System	2

2) Rencana Anggaran Biaya
Program Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Terkait Mekanisme KIS, dapat terlakasana dengan anggaran sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Rencana Anggaran Biaya " Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Terkait Mekanisme Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung".

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
Logistik					
1	Banner Kegiatan Sosialisasi	2	Lembar	40.000,00	80.000,00
2	Sound System	2	Unit	150.000,00	300.000,00
3	ATK	5	Paket	50.000,00	250.000,00
4	Doorprize	5	Unit	30.000,00	150.000,00
Honorarium					
1	BPJS Kesehatan	1	Orang	900.000,00	900.000,00
Konsumsi					
1	Snack Panitia	6	Box	10.000,00	60.000,00
2	Snack Tamu Undangan	10	Box	10.000,00	100.000,00
3	Snack Peserta	50	Box	10.000,00	500.000,00
Transportasi					
1	Pemateri	2	Orang	150.000,00	300.000,00
Jumlah					**2.640.000,00**

g. Analisis Kelayakan Program

Tabel 2. 6 Analisis SWOT Analis Jaminan Sosial

Faktor Internal / **Faktor Eksternal**	**Kekuatan (Strength):** **1. Adanya narasumberyang tepat** **2. Kegiatan didukung oleh masyarakat dan Pemerintah.**	**Kelemahan (Weakness):** **Adanya kemungkinan masyarakat tidak paham materi yang disampaikan**
Peluang (Opportunity): **1. Dapat meningkat kesejahteraan warga** **2. Memberikan jaminan dan perlindungan kepada warga**	**Strategi SO:** **1. Melakukan kerjasamadengan lembaga pemerintah** **2. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat**	**Strategi WO:** **1. Penyampaian Sosialisasiyang menarik dan menggunakan komunikasi dua arah** **2. Penyampaian Sosialisasi dengan Bahasa yang mudah dipahami**
Ancaman (Threats): **Peserta tidak datang mengikuti kegiatan**	**Strategi ST :** **Membuat doorprize dalam kegiatan**	**Strategi WT :** **1. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.** **2. meningkatkan intensitas pembinaan secara langsusng**

Berdasarkan hasil analisis kelayakan Program Sosialisasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) terkait warga tidak mau mendaftarkan diri sebagai peserta KIS di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung dengan menggunakan analisis SWOT dapat diketahui bahwa aspek kekuatan lebih banyak apabila dibandingkan dengan aspek kelemahan. Dengan adanya narasumber yang tepat, maka masyarakat akan mudah memahami dan menambah pengetahuannya dan dengan melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah dapat meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Sedangkan aspek kelemahan nya hanya masyarakat kemungkinan tidak paham dengan materi yang disampaikan. Oleh karena itu, pada kegiatan ini terdapat narasumber yang tepat dan kegiatan ini dibuat semenarik mungkin.

h. Jadwal dan Langkah-langkah

1) Langkah-langkah Pelaksanaan

Langkah dan pelaksanaan kegiatan bertujuan agar jalannya acara menjadi lancar dan berjalan dengan sistematis agar tercapainya tujuan dari acara tersebut. Adapun langkah-langkah dan pelaksanaan kegiatan adalah :

a. Tahap Pra Kegiatan :
   a) Dalam kegiatan ini praktikan akan mengundang Dinas Sosial Kota Bandung, Pihak Kelurahan Sukapura, Ketua RW 09 dan RW 13.
   b) Narasumber yang menyajikan materi tersebut adalah Kader BPJS Kesehatan dan Kasie Bidang Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sukapura
   c) Lokasi yang akan digunakan sebagai tempat berjalannya kegiatan sosialisasi ini adalah di Aula Kantor Kelurahan Sukapura.

b. Tahap Pelaksanaan
   a) Sambutan oleh Lurah Kelurahan Sukapura
   b) Pemaparan Materi terkait Pengenalan BPJS Kesehatan
   c) Sesi tanya jawab
   d) Dokumentasi
   e) Penutup

c. Tahap Pengakhiran

   Ditahap pengakhiran ini, pekerja sosial dan tim kerja melakukan evaluasi mengenai program yang telah berakhir. Evaluasi yang dilakukan adalah menyebarkan angket kepada peserta setelah penyuluhan berakhir, menganalisis data, mengolah hasil data tersebut, dan membuat laporan pertanggungjawaban mengenai penyuluhan. Terakhir adalah melakukan pembubaran panitia.

2) Jadwal Kegiatan

Berikut merupakan rancangan pelaksanaan kegiatan program:

Tabel 2. 7 Jadwal Kegiatan Program " Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Terkait Mekanisme Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung".

No	Waktu	Kegiatan	Pengisi Acara	Penanggung Jawab
1	08.30-09.00	Registrasi Peserta	Divisi Acara	Divisi Acara
2	09.00-09.10	Pembukaan oleh MC	MC	Divisi Acara
3	09.10-09.20	Sambutan dari Lurah	Lurah	Divisi Acara
4	09.20-10.20	Pemaparan Materi terkait Pengenalan BPJS Kesehatan	Pihak BPJS Kesehatan	Divisi Acara dan Humas
5	10.20-10.40	Sesi tanya jawab	Pihak BPJS Kesehatan	Divisi Acara dan Humas
6	10.40-10.45	Dokumentasi	Divisi Publikasi dan Dokumentasi	Divisi Publikasi dan Dokumentasi
7	10.45-10.55	Penutup	MC	Divisi Acara

i. Indikator Keberhasilan

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Program Sosialisasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) maka disusun indikator keberhasilan sebagai berikut :

a. Meningkatnya pengetahuan mengenai kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
b. Meningkatnya kesadaran masyarakat Kelurahan Sukapura terhadap untuk mendaftarkan kepesertaan KIS.
c. Sasaran mampu memahami mengenai KIS
d. Sasaran mampu memahami alur administrasi kepesertaan KIS
e. Peningkatan rasa tanggungjawa kader BPJS Kesehatan dalam merespon keluhan warga terkait KIS
f. Peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya terdaftar dalam program jaminan kesehatan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu

B. Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

1. Gambaran Umum Masalah

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. Sifat bantuan ini, tidak secara terus menerus dan selektif. Bantuan ini berupa uang atau barang yang pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tujuannnya untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatun, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Jaminan ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Utamanya merupakan sebuah bidang kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial yang di dalamnya termasuk kemiskinan, lansia, kecacatan, pengangguran, keluarga yang memiliki anak sekolah.

Hubungan bantuan sosial dengan jaminan sosial sangat berkaitan karena sangat mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Salah satu penyebabnya peningkatan penduduk yang menyandang kecacatan yang diakibatkan dari ekonomi yang tdiak memadai sehingga membuat para penyandang cacat berat menjadi bingung bagaimana bertahan hidup.

Di kelurahan Sukapura sendiri program BST ini tidak berjalan dengan efektif. Tedapat berbagai masalah didalam pelaksanaannya, seperti pada

penerima yang tidak tepat sasaran, sosialisasi yang dilakukan masih kurang kepada seluruh masyarakat KPM, pelaksanaan program BST belum transparan, banyaknya data yang terduplikasi, adanya masalah terkait validasi dan verifikasi data antara pusat daerah yang berbeda, serta dengan adanya program BST ini munculah permasalahan kecemburuan sosial yang terjadi pada warga dengan KPM. Dengan sudah disebutkan isu yang ada di Kelurahan Sukapura diatas, maka praktikan tertarik hanya pada satu fokus masalah saja, yaitu "program BST ini diberikan tidak tepat sasaran dan dengan adanya program BST ini munculah permasalahan kecemburuan sosial yang terjadi pada warga dengan KPM". Praktikan memilih isu tersebut karena dengan adanya permasalah ini perlu adanya tindakan lanjut dari mengenai pelaksanaan program BST tersebut, dan harus diselesaikan agar tidak terjadi konflik serta warga paham akan hal ini.

2. Tinjauan Konsep/Teori yang Relevan dengan Masalah

a. Pengertian Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 15, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif dan yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 16 menjelaskan resiko sosial yang dimaksud ialah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan dana bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Ketentuan baru dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 yang sebelumnya tidak diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yaitu pasal 23A yaitu bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak direncanakan sebelumnya.

UU Nomor 14 Tahun 2019 merupakan perubahan atas UU nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Menurut UU nomor 14 Tahun 2019,

Bantuan Sosial merupakan bantuan berupa barang, uang atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang kurang mampu, tidak mampu atau rentan terhadap risiko sosial. Peraturan ini juga diperjelas dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Lalu, berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pemberi bantuan sosial harus merupakan satuan kerja pada kementerian atau lembaga pada Pemerintah Pusat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugasnya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, meliputi: perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

b. Penyaluran Bantuan Sosial

Penyaluran bantuan sosial dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 diatur menegani mekanisme untuk memperoleh dana bantuan sosial. Untuk dapat memperoleh dana bantuan sosial yang garus dilakukan oleh para pemohon :

1. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah.
2. Kepala daerah menunjuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis tersebut. Jika disetujui oleh kepala SKPD terkait maka akan diberikan rekomendasi kepada kepala daerah melalu tim aggaran pemerintah daerah (TAPD).
3. TAPD akan memberikan pertimbangan atas rekomendasi tersebut sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
4. Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD akan menjadi dasar pencantuman aloaksi anggaran bantuan sosial dalam rancanangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Pencantuman alokasi anggaran tersebut meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang/barang. Bantuan sosial beruoa uang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD), sedangkan bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD). RKA-PPKD dan RKA-SKPD tersebut akan menjadi dasar penangguran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial, dan rincian objek belanja berkenaan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

c. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Penyaluran Bantuan Sosial

Menurut Suharto dalam (Rayadi, 2016) mengemukakan bahwa, "Pengelolaan dana bantuan haruslah benar-benar tertuju bagi daerah miskin dan penduduk miskin. Jangan sampai terjadi dis-alokasi dan mis-alokasi."

Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan landasan konstitusional mengenai perwujudan tujuan dalam pelaksanaan Pemerintah di Indonesia yakni untuk memajukan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah penyaluran bantuan sosial, pemerintah pusat mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk megurus daerah otonomnya masing-masing dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dibawah pengawasan Pemerintah Pusat.

Fungsi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kesejahteraan sosial di daerhanya dengan menganggarkan belanja daerah dalam bentuk hibah dan bantuan sosial yang semua pelaksanaannya sudah diatur dalam Perundang-undangan maupun Peraturan Kepala Daerah.

d. Dasar Hukum Bantuan Sosial

Dasar hukum penyaluran atau pemberian bantuan sosial terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemeberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyatakan bahwa Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi. Pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2012 harus berpedoman kepada Pearuran Menteri ini.

e. Jenis-jenis Bantuan Sosial

1. Bantuan sosial berupa uang atau bantuan sosial tunai. Bantuan ini diberikan langsung kepada penerima dalam bentuk beasiswa, sumbangan ke yayasan atau ke masyarakat miskin atau lanjut usia.
2. Bantuan sosial berupa barang. Bantuan yang diberikan berupa barang, sepeti bantuan perahu untuk nelayan miskin dan makanan atau pakaian kepada anak yatim piatu serta tuna wisma.
3. Bantuan sosial berupa jasa. Bantuan yang diberikan berupa jasa yang disalurkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seperti pemeberian pelatihan untuk penerima bantuan satuan kerja.

f. BST (Bantuan Sosial Tunai)

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kemensos RI yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). BST ini akan disalurkan melalui Kemensos, Pos Indonesia, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan akan diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI) yang sudah terdaftar atau belum dalam DTKS milik Kemensos.

g. Cara mengecek penerima BST

1. Data yang harus disiapkan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP. Dengan memasukkan NIK, akan diketahui apakah ia telah terdaftar sebagai penerima BST atau bukan.
2. Masyarakat dapat mengecek perihal bantuan tersebut di laman https://cekbansos.siks.kemsos.go.id. Saat melakukan pengecekan melalui cekbansos.siks.kemsos.go.id, akan muncul tampilan "Pencarian Data Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST)".
3. Gunakan salah satu alternatif yang tersedia antara lain, nomor identitas yang terdaftar di sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), nomor kepesertaan BPJS Kesehatan, atau Nomor Induk Kependudukan (NIK).
4. Setelah memilih identitas yang akan digunakan, di kolom kedua nomor identitas DTKS/Basis Data Terpadu (BDT). Selanjutnya, pada kolom tiga ada nama anggota rumah tangga (ART). Pada kolom ini, pengguna diminta menuliskan nama siapa saja yang tinggal dan makan di rumah tangga ini baik orang dewasa, anak-anak, maupun bayi.
5. Tuliskan nama sesuai dengan identitas atau KTP. Kemudian, memasukkan kode captcha sesuai dengan karakter huruf yang muncul di layar di bawah kolom. Lalu, klik tombol "Cari". Setelah itu, sistem aplikasi penerima BST akan memproses data yang dimasukkan dan mengeluarkan informasi apakah identitas yang dimasukan tersebut terdaftar sebagai penerima BLT Rp 500.000 atau tidak.

3. Asesmen

Praktikum laboratorium pada isu analisis pengelolaan sumber dana bantuan sosial yang dilakukan tanggal 23 Februari hingga 8 Maret 2023. Praktikan memilih isu terkait sumber dana bantuan sosial yang diberikan di masyarakat tidak tepat sasaran yang ada di lingkungan Kelurahan Sukapura ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara. Sedangkan data sekunder praktikan menggunakannya melalui internet seperti website, jurnal, dan artikel. Untuk teknologi asesmen yang digunakan oleh praktikan yaitu Analisis Pohon Masalah. Analisis Pohon Masalah adalah suatu metode untuk mengidentifikasi semua masalah dalam situasi tertentu dan memperagakannya sebagai rangkaian hubungan sebab akibat. Penyusunan analisis pohon masalah membantu untuk menemukan solusi dengan memetakan sebab akibat disekitar masalah utama untuk membentuk pola pikir lebih jelas dan terstruktur. Selama melakukan observasi di lapangan, praktikan menemukan beberapa isu mengenai sumber dana bantuan sosial di lingkungan Kelurahan Sukapura ini, yaitu masyarakat dengan penerima manfaat muncul kecemburuan sosial, masyarakat yang mempunyai pengahasilan tetap mendapatkan bantuan sedangkan yang hanya bekerja serabutan tidak mendapatkan bantuan, pihak kelurahan sudah mengvalidasi menghapus nama warga yang sudah meninggal tetapi nama tersebut masih tetap ada karena telah disingkronkan antara Disduk dan Data Kemensos ternyata tidak sama, lalu karena ada acuan ketentuan dari Disduk yang dinyatakan sudah meninggal itu yang sudah membuat Akteu sementara ini pihak keluarga yang bersangkutan enggan mengurus surat-suratnya dengan berbagai alasan. Dalam banyaknya isu, praktikan tertarik hanya fokus pada satu isu saja yaitu mengenai masalah "Bantuan Sosial Tunai (BST) ini diberikan tidak tepat sasaran". Praktikan tertarik mengambil isu tersebut untuk di asesmen karena untuk pemerataan akan sangat penting, diterapkannya agar menyesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing. Cara ini mungkin mampu meredam potensi gejolak dan gesekan sosial di tengah masyarakat akibat kecemburuan yang disebabkan tidak meratakanya bantuan ini.

a. Identifikasi Masalah

Pada tanggal 3 Maret 2023, pada pukul 11.20 WIB praktikan melakukan wawancara tepatnya di Aula Kelurahan Sukapura dengan Bapak A selaku puskesos Kelurahan Sukapura mengenai permasalahan Sumber Dana Bantuan Sosial yang ada di Kelurahan Sukapura ini. Dan didapatkan beberapa informasi, yaitu di lingkungan Kelurahan Sukapura ini ada Sumber Dana Bantuan Sosial yang biasa disebut "BST (Bantuan Sosial Tunai)". BST itu merupakan bentuk program dari pemerintah di bidang sosial dan PKH itu sendiri tindak lanjut dari BST ini. Untuk sasaran nya sama seperti PKH yaitu memprioritaskan warga yang tidak mampu. Untuk jumlah KPM nya tiap RW bervariasi dan pengelolaannya langsung dari Dinsos melalui para pendamping PKH yang sudah

di tugaskan di wilayah masing-masing. Permasalahan yang sering terjadi pada sumber dana bantuan sosial BST ini sangat banyak baik dari penerima manfaatnya banyak kecemburuan sosial, contohnya yang mempunyai penghasilan tetap dapat BST ini sedangkan warga yang pekerjaannya serabutan tidak mendapatkan BST. Ada juga permasalahan dari pengelolaannya dari sistem, contohnya dari pihak kelurahan sudah memvalidasi menghapus warga yang sudah meninggal dan sudah dilaporkan ke Dinsos tapi ujung-ujungnya masih ada nama warga tersebut, karena setelah sudah disingkronkan antara Disduk dan data Kemensos ternyata tidak sama. Karena acuan ketentuan dari Disduk yang dinyatakan sudah meninggal itu yang sudah membuat Akte Kematian. Sementara itu, pihak keluarga yang bersangkutan enggan mengurus surat-suratnya dengan berbagai macam alasan. BST ini bantuan sosial berupa uang tunai. Biasanya program ini turun per triwulan. Untuk proses pendaftaran nya warga harus masuk DTKS terlebih dahulu. Selanjutnya diusulkan oleh RT, RW nya untuk diusulkan melalui Musyawarah Kelurahan, dan selanjutnya diusulkan ke Dinsos.

Gambar 13 Wawancara Bersama A Puskesos Kelurahan Sukapura

Berdasarkan informasi yang sudah didapatkan melalui wawancara dengan Bapak A, selanjutnya praktikan melakukan wawancara kembali dengan Ibu S selaku Pendamping dan Agen PKH yang ada di RW 03, pada tanggal 9 Maret 2023 pada pukul 11.16 WIB di kediaman beliau tinggal. Pada kali ini praktikan melakukan wawancara dengan tujuan mencari lebih lanjut dan menggali isu yang terkait yang diangkat yaitu “Program BST diberikan tidak tepat sasaran dan dengan adanya program BST menimbulkan kecemburuan sosial antar warga dengan KPM”. Hasil wawancara dengan Ibu S didapatkan beberapa informasi, yaitu :

1) Ibu S mengakui bahwa di RW 03 ini banyak warga yang komplein kepada Ibu S karena warga merasa bahwa pembagian bantuan ini tidak adil atau tidak

dibagikan secara merata. Padahal warga yang komplein ini dibilang cukup mampu dan mempunyai pekerjaan yang tetap.

2) Di RW 03 yang mendapatkan PKH sejumlah 72 KK, dan yang mempunyai KKS sejumlah 114.
3) Bantuan BST ini diberikan kepada warga setiap tanggal 10 pada per bulannya, dan warga bisa mengambil uang tersebut melalui pos, bank, atau bisa juga lewat Ibu S selaku agen PKH yang ada di RW 03. Tetapi, kebanyakan warga yang mengambil langsung uang nya ke Bank, karena jika melewati Ibu S pasti dikenakan biaya admin.
4) Bantuan program BST ini berupa uang.
5) Untuk sasarannya warga yang tidak mampu dan lebih mengutamakan untuk keluarga yang tidak mampu yang memiliki anak sekolah baik itu SD, SMP, maupun SMA.
6) Warga yang mendapatkan BST biasanya di RW 03 ini rata-rata menerima per bulannya sejumlah Rp.300.0000 atau ada juga Rp.500.0000, karena di setiap RW berbeda-beda kisaran yang diterima tergantung kepada kebutuhan KPM itu sendiri.
7) Untuk warga yang ingin mendapatkan bantuan BST ini harus terdaftar pada DTKS jika sudah terdaftar di DTKS warga bisa mengajukan/mendaftarkan diri nya melalui RT, RW dahulu dan di setiap RW nya mempunyai pendamping. Jadi sebelum ke RT, RW warga bisa mangajukan terlebih dahulu ke pendampingnya dan selanjutnya diserahkan kepada Kelurahan.
8) Di RW 03 untuk mekanisme mensosialisasikan bantuan BST ini kepada warga terkait tujuan bantuan ini diberikan belum maksimal, sosialisasi dilakukan hanya mulut ke mulut saja.

Gambar 14 Wawancara bersama Pendamping PKH

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai identifikasi masalah yang ada pada Kelurahan Sukapura ini, praktikan dapat menjelaskan disini melalui analisis pohon masalah sebagai berikut.

Analisis Pohon Masalah

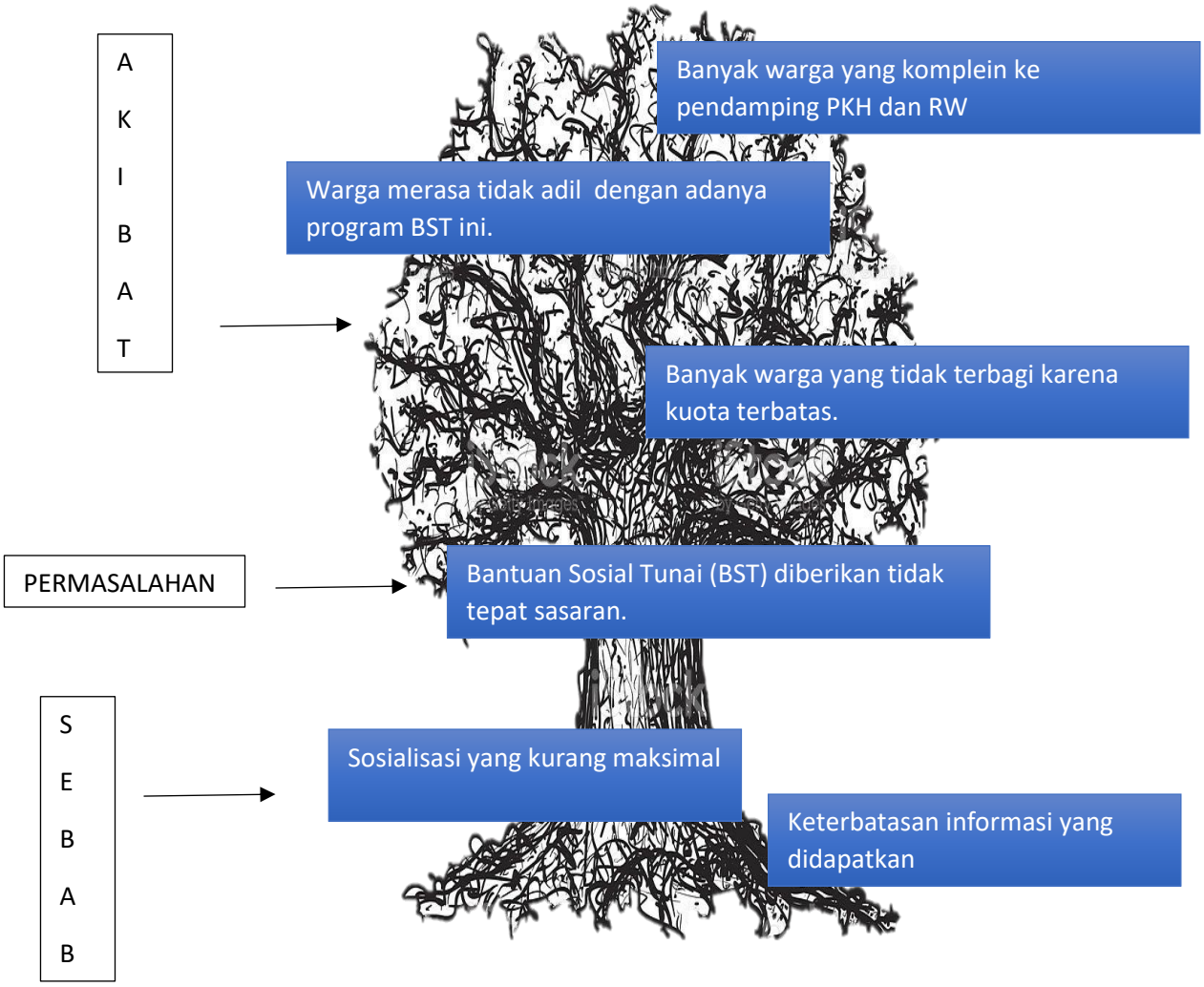

Gambar 15 Pohon Masalah Analis Sumber Dana Bansos

1) Penyebab Masalah

Dari hasil identifikasi masalah, dapat disimpulkan beberapa penyebab masalah sebagai berikut :

a. Sosialisasi terkait tujuan diselenggarakan Program BST ini yang kurang maksimal. Hal ini berkaitan dengan penyebaran informasi yang didapatkan oleh warga terkait BST belum optimal dikarenakan sosialisasi hanya dilakukan di awal program tersebut ada.
b. Keterbatasan informasi yang didapatkan. Karena sosialisasi kurang maksimal, hal ini dapat menyebabkan masalah dikarenakan informasi yang disebarkan hanya melalui dari mulut ke mulut saja.

2) Dampak Masalah

Dari hasil identifikasi masalah, dapat disimpulkan beberapa dampak masalah sebagai berikut.

a. Banyak warga yang komplein ke Pendamping PKH dan ke RW. Dengan adanya masyarakat yang masih belum memiliki pemahaman dan kurangnya pengetahuan mengenai adanya Program Pemerintah Bantuan Sosial Tunai ini banyak warga yang mengeluhkan hal ini ke Kelurahan dan berharap kelurahan dapat segera menyelesaikan permasalahan ini.
b. Warga merasa tidak adil dengan adanya Program BST ini. Hal ini dikarenakan ada warga yang sudah memiliki penghasilan yang tetap namun dia diberikan BST ini, sedangkan warga yang tidak mempunyai pekerjaan atau bekerja hanya serabutan saja tetapi mereka tidak mendapatkan bantuan ini.
c. Banyak warga yang kurang mampu tidak dapat BST ini karena kuota yang terbatas. Dengan kondisi tersebut, banyak warga yang tidak memiliki penghasilan tetap atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari belum terdaftar sebagai penerima manfaat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nama yang tidak terdaftar karena kuota yang sedikit, akhirnya pembagiannya pilih kasih, tidak bisa dapat semua.

3) Fokus Masalah

Berdasarkan hasil asesmen maka prioritas permasalahan yang dipilih adalah Bantuan Sosial Tunai ini diberikan tidak tepat sasaran.

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan fokus masalah, maka identifikasi kebutuhan yang diperlukan sesuai permasalahan yang ada adalah :

a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai tujuan program BST ini diberikan.
b. Pemberian informasi yang jelas dan lengkap terhadap warga agar tidak terjadinya kecemburuan sosial.
c. Pemerintah desa harus perbaikan manajemen data dan mengoptimalisasi satu data nasional.

d. Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi atau integrasi program-program bansos.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Berdasarkan identifikasi kebutuhan, potensi dan sumber yang diperlukan sesuai permasalahan yang ada adalah :

1. Dinas Sosial Kota Bandung
   Dinas Sosial memiliki peran penting terhadap perizinan-perizinan dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Dengan turut terlibat untuk membantu dan memecahkan persoalana yang ada.
2. Tokoh Masyarakat
   Tokoh masyarakat yang dimaksudkan yaitu orang-orang memiliki pengaruh di lingkungan sekitar. Seperti Ketua RT, RW, Lurah, Kader PKK, tokoh agama, dan *key person* lainnya. Tokoh masyarakat dapat dimanfaatkan untuk menjadi pemberi masukan terhadap permasalahan yang ada.

4. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Pekerja sosial sebagai salah satu jembatan pelayanan kesejahteraan sosial, dengan turut terlibat untuk membantu memecahkan persoalan yang ada. Salah satunya yaitu menanggapi mengenai isu sumber dana bantuan sosial. Meskipun dalam melaksanakan perannya seringkali dihadapkan dengan berbagai kendala. Terdapat juga beberapa permasalahan dalam sumber dana bantuan sosial meliputi adanya BST ini diberikan tidak tepat sasaran dan menimbulkan kecemburuan sosial antara warga dengan penerima manfaat.

Seperti halnya permasalahan yang ada di Kelurahan Sukapura ini tepatnya di RW 03 sering terjadi apabila ada program bantuan dari Pemerintah, warga merasa jika pembagian bantuan BST ini diberikan tidak tepat sasaran dan akhirnya warga merasa tidak adil dan bantuan ini dengan adanya kuota yang terbatas masih banyak warga yang kurang mampu tidak terbagi Serta ada juga warga yang terbilang mampu namun mereka mendapatkan bantuan sosial ini, sedangkan warga yang tidak mampu mereka tidak mendapatkannya. Dilihat dari permasalahan yang ada maka terjadilah kecemburuan sosial antara warga dengan penerima manfaat.

Berdasarkan dasar hukum bantuan sosial, yang berhak mendapatan bantuan sosial ini individu, kelompok, atau masyarakat yang kurang mampu. Dengan tujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuan, rasionalitas, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga program atau rencana intervensi yang dapat dilakukan oleh praktikan ini yaitu sosialisasi terkait mekanisme dan tujuan bantuan BST ini diselenggarakan.

b. Tujuan Umum dan Khusus

1) Tujuan Umum

Tujuan umum mengenai rencana intervensi yang akan dilakukan yaitu untuk memberikan dan meningkatnya pengetahuan kepada masyarakat dalam melakukan diselenggarakannya bantuan BST ini.

2) Tujuan Khusus

a. Meningkatnya pengetahuan warga mengenai tujuan diselenggarakan pemberian bantuan ini, agar tidak terjadinya kecemburuan sosial.

b. Berkurangnya kompleinan warga kepada RW dan pendamping PKH.

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Berdasarkan analisis masalah yang telah dirumuskan diadakan sosialisasi dan edukasi. Maka program yang akan dilaksanakan adalah "Sosialisasi Peningkatan Pemahaman terkait mekanisme Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung." Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi warga untuk melaksanakan mekanisme sesuai peraturan dan membahas terkait tujuan dan sasaram pelaksanaan program BST.

Tabel 2. 8 Bentuk Kegiatan dan Program Analis Sumber Dana Bansos

Kegiatan Penyelesaian Masalah	Sasaran	Tujuan	Pelaksana	Penanggung jawab	Jadwal Kerja	Sumber biaya
Sosialiasi terkait pengenalan Bantuan Sosial Tunai	Warga Kelurahan Sukapura	Meningkatnya pengetahuan warga Kelurahan Sukapura terkait tujuan diselenggarakannya Bantuan Sosial Tunai	Dinas Sosial	Kepala Lurah	1 hari	Kelurahan Sukapura

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan rencana intervensi yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 9 Sistem Partisipan Program "Sosialisasi Peningkatan Pemahaman terkait mekanisme Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung."

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Initiator System	Pekerja Sosial

2.	Change Agent System	Pekerja Sosial
3.	Client System	Warga Kelurahan Sukapura
4.	Support System	Ketua RT dan RW Kelurahan Sukapura, Puskesmas, Dinas Sosial
5.	Controlling System	Kelurahan Sukapura
6.	Implementing System	Ketua RT dan RW, Pemerintah Kelurahan Sukapura, Pemerintah Kecamatan Kiaracondong
7.	Target System	Warga Kelurahan Sukapura
8.	Action System	Pekerja Sosial dan Dinas Sosial

e. Metode dan Teknik

Metode yang digunakan praktikan selama melaksanakan proses intervensi terhadap permasalahan yang ada adalah Pengembangan Masyarakat *(Community Development)* atau Pengembangan Organnisasi *(Community Organization). COCD* adalah suatu proses untuk memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat atau suatu bidang tertentu. Strategi yang digunakan ialah kolaboratif atau bekerjasama dengan pihak dan sistem lainnya untuk mengefektivitaskan pelaksanaan program.

Adapun teknik yang digunakan praktikan ialah penyuluhan sosial. Penyuluhan sosial adalah kegiatan yang dimaksudkan sebagi gerak dasar dan awal untuk bisa lebih memberikan kesiapan dan manfaat program bagi warga sasaran yang ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan, kepercayaan dan keyakinan akan perubahan serta kesadaran dari warga sasaran agar memiliki rasa tanggungjawan penuh dalam diri sendiri. Penyuluhan akan disampaikan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dengan adanya kegiatan tersebut, maka diharapkan adanya perubahan dari masyarakat.

f. Rencana Anggaran dan Alat yang Dibutuhkan

1. Alat

   Adapun alat yang diperlukan dalam pelaksanaan rencana intervensi adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 10 Alat yang dibutuhkan

No	Alat	Jumlah
1	Laptop	3
2	Kursi	30
3	Alat Tulis	5
4	LCD	1
5	Proyektor	1
6	Kamera	2
7	Sound System	1
8	Mikrofon	2

2. Rencana Anggaran Biaya

Tabel 2. 11 Rencana Anggaran Biaya Program "Sosialisasi Peningkatan Pemahaman terkait mekanisme Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung."

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
Logistik					
1	Banner Kegiatan Sosialisasi	1	Lembar	70.000,00	70.000,00
2	Sound system	1	Unit	150.000,00	150.000,00
3	ATK	5	Paket	50.000,00	250.000,00
Honorarium					
1	Dinas Sosial Kota Bandung	1	Orang	900.000,00	900.000,00
Konsumsi					
1	Snack Panitia	6	Box	10.000,00	60.000,00
2	Snack Tamu Undangan	6	Box	10.000,00	60.000,00
3	Snack Peserta	30	Box	10.000,00	300.000,00
Jumlah					**1.790.000,00**

g. Analisis Kelayakan Program

Tabel 2. 12 Analisis SWOT Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

Faktor Internal / **Faktor Eksternal**	**Kekuatan (Strength):** kemudahan ikut berpartisipasi dalam menyusun program bansos	**Kelemahan (Weakness):** Kurangnya kemampuan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang program bansos.
Peluang (Opportunity): Peluang atau adanya potensi yang memadai untuk pengembangan program bansos, segala keputusan yang diambil dalam musyawarah pemerintah desa berpihak pada masyarakat miskin.	**Strategi SO:** Memanfaatkan dukungan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial Kota Bandung	**Strategi WO:** Penyampaian Sosialisasi dengan Bahasa yang mudah dipahami dan dicerna
Ancaman (Threats): Kemudahan memperoleh layanan dan informasi yang salah dala, program bansos dari pemerintah	**Strategi ST:** Melakukan penyebaran informasi secara luas baik secara langsung dan lewat media elektronik	**Strategi WT:** Membuat kegiatan dengan menarik dan mudah dipahami disertai membuka diskusi.

Berdasarkan hasil analisis kelayakan program dengan menggunakan analisis SWOT dapat diketahui bahwa aspek kekuatan lebih banyak apabila dibandingkan dengan aspek kelemahan. Dengan adanya potensi yang memadai untuk pengembangan program bantuan sosiall di Kelurahan Sukapura ini segala keputusan yang diambil dalam musyawarah pemerintah daerah Kelurahan Sukapura berpihak pada masyarakat miskin atau masyarakat yang sesuai kriteria untuk mendapatka program bantuan sosial ini.

Sedangkan untuk kelemahannya sendiri kurangnya kemampuan pengetahuan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai program bantuan sosial ini. Dengan diadakan penyuluhan sosial, yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat dan membuat kegiatan dengan menarik, maka masyarakat akan paham mengenai program bantuan sosial dar pemerintah ini dan tidak ada menimbulkan kecemburuan sosial lagi.

h. Jadwal dan Langkah-Langkah

1) Jadwal

Tabel 2. 13 Jadwal Pelaksanaan Program "Peningkatan Pemahaman terkait mekanisme Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung."

No	Waktu	Kegiatan	Pengisi Acara	Penanggung Jawab
1	08.30-09.00	Persiapan	Divisi Acara	Divisi Acara
2	09.00-09.10	Pembukaan oleh MC	MC	Divisi Acara
3	09.10-09.15	Sambutan Lurah Sukapura	Kepala Lurah	Divisi Acara
4	09.15-10.20	Pemaparan Materi terkait Bantuan Sosial	Dinas Sosial Kota Bandung	Divisi Acara dan Divisi Humas
5	10.20-10.50	Sesi Tanya Jawab	Dinas Sosial Kota Bandung	Divisi Acara dan Divisi Humas
6	10.50-10.55	Dokumentasi	Divisi Pubdekdok	Divisi Pubdekdok
7	10.55-11.00	Penutup	MC	Divisi Acara

2) Langkah-langkah

a. Pra Pelaksanaan

(1) Membentuk tim dan Panitia kegiatan

(2) Melakukan rapat dan menentukan rencana dan jadwal kegiatan

(3) Menentukan materi dan narasumber

(4) Mengurus izin kegiatan

(5) Mempersiapkan alat, kebutuhan, tempat untuk kegiatan

b. Pelaksanaan

(1) Penyuluhan tentang izin bantuan sosial

(2) Mempastikan partisipan hadir

(3) Mengajak partisipan untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi

c. Pasca Pelaksanaan

(1) Melakukan monitoring dan evaluasi program

(2) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program.

i. Indikator Keberhasilan

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program maka disusun indikator keberhasilan sebagai berikut :

a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait tujuan diadakannya bansos ini.
b. Perlu adanya penyempurnaan terkait dengan penyaluran dan proses validatas penerimaan bansos.
c. Perlu adanya perbaikan manajemen data penerima bansos

C. Profil Analis Pemberdayaan Sosial

1. Gambaran Umum Masalah

Dalam rangka memajukann kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya di Kota Bandung, pemerintah menggalakan program penanggulangan kemiskinan dengan memberikan dukungan anggaran pada PBN maupun PBD agar masyarakat miskin cukup diberdayakan dengan berbagai program-program pemberdayaan penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP), program pembangunan kecamatan, dan juga termasuk program upaya peningkatan pendapatan keluarga (UP2K). Tujuannya untuk memberikan gambaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program UP2K-PKK, selain itu bertujuan untuk mengetahui gambaran dan efektifitas upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sukapura tepatnya di RW 05, dan untuk mengetahui bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program UP2K-PKK di Kelurahan Sukapura RW 05.

Program UP2K-PKK (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) ini merupakan gerakan nasional dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang dalam pelaksanaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sehingga pemanfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Gerakan ini merupakan salah satu implementasi kebijakan di bidang pemberdayaan wanita dari segi perekonomian. Hal ini dikarenakan dengan meningkatnya kebutuhan dan keadaan menjadikan wanita yang sangat perlu diberdayakan dalam membantu peningkatan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan penjelasan tersebut, praktikan tertarik untuk mengangkat isu mengenai “ kurangnya pengetahuan dan keterampilan Program UP2K dalam manajemen dan distribusi produk yang ada di RW 05”. Tak hanya itu, isu ini juga dapat menjadi potensi untuk meningkatkan kekuatan ekonomi keluarga dengan pemberdayaan yang ada.

2. Tinjauan Konsep/Teori yang Relevan dengan Masalah

a. Konsep Pemberdayaan Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami

masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain darihanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

b. Aras Pemberdayaan Sosial

Dalam konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empoowerment setting*): mikro, meso, dan makro.

1) Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan konseling, stress management, krisis intervensi. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugastugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai Pendekatan yang Berpusat pada Tugas (Task Centered Approach).
2) Aras Meso. Pemberdayaan dilakukan pada sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3) Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi sistem besar (large system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasisituasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

c. Dasar Hukum Pemberdayaan Sosial

Berikut merupakan dasar hukum pelaksanaan pemberdayaan sosial di Indonesia:

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan

Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

d. Pengertian UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga – Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (UP2K- PKK) adalah segala kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh keluarga, baik secara perorangan maupun kelompok, yang modalnya bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, bantuan luar negeri, swasta, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (Pedoman Pelaksanaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) – PKK, 2010).

Kegiatan Program UP2K-PKK merupakan salah satu program pembangunan yang berkaitan dengan upaya pembangunan masyarakat di bidang ekonomi, perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ketika pembangunan ekonmi masyrakat sudah terlaksana dengan baik maka sumber daya manusia pun akan semakin berkualitas karena kehidupan masyarakatnya sejahtera. Tentunya hal ini juga merupakan salah satu upaya peningkatan SDM.

1. Dasar Hukum UP2K

Berdasarkan Kepmen Nomor 53 Tahun2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Undang-undang Nomor10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan KeluargaSejahtera, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-undangNomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor 53 B Tahun 1993 Tentang Pedoman Program Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga PKK, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga.

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang diatas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang,

papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemuadian keamanan dan ketentraman hidup.

3. Asesmen

Praktikum laboratorium pada isu ketiga yaitu Analisis Pemeberdayaan Sosial, yang dilakukan pada tanggal 8 Maret-18 Maret 2023. Praktikan memilih isu terkait kurangnya pengetahuan dan keterampilan Program UP2K dalam manajemen dan distribusi produk di RW 05 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung. Praktikan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan Ibu E selaku Ketua Posyandu RW 05. Kemudian praktikan menggunakan data sekunder melalui internet seperti junal dan website. Teknologi asesmen yang digunakan praktikan yaitu Analisis Pohon Masalah. Analisis pohon masalah adalah suatu metode untuk mengidentifikasi semua masalah dalam situasi tertentu dan memperagakannya sebagai rangkaian hubungan sebaab akibat. Penyusunan analisis pohon masalah membantu untuk menemukan solusi dengan memetakan sebab akibat disekitar masalah utama untuk membentuk pada pola pikir dengan lebih struktur.

a. Identifkasi Masalah

Pada tanggal 9 Maret 2023, pada pukul 11.05 WIB, praktikan melakukan wawancara tepatnya di Kantor RW 05 denga Ibu E selaku Ketua Posyandu mengenai isu pemberdayaan sosial yang ada di RW 05. Setelah melakukan wawancara ternyata ada Program UP2K yang dilakukan oleh PKK dan mendapatkan beberapa informasi mengenai permasalahan yang ada di Program UP2K ini selama berlangsung yaitu kualitas SDM yang terbatas dalam melakukan inovasi baru , kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung, kesulitan dalam penentuan target pasar dan pendistribusian, dan modal usaha yang tidak cukup.

Gambar 16 Bersama Ketua Posyandu RW 05

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai identifikasi masalah yang ada pada Kelurahan Sukapura ini, praktikan dapat menjelaskan disini melalui analisis pohon masalah sebagai berikut.

Analisis Pohon Masalah

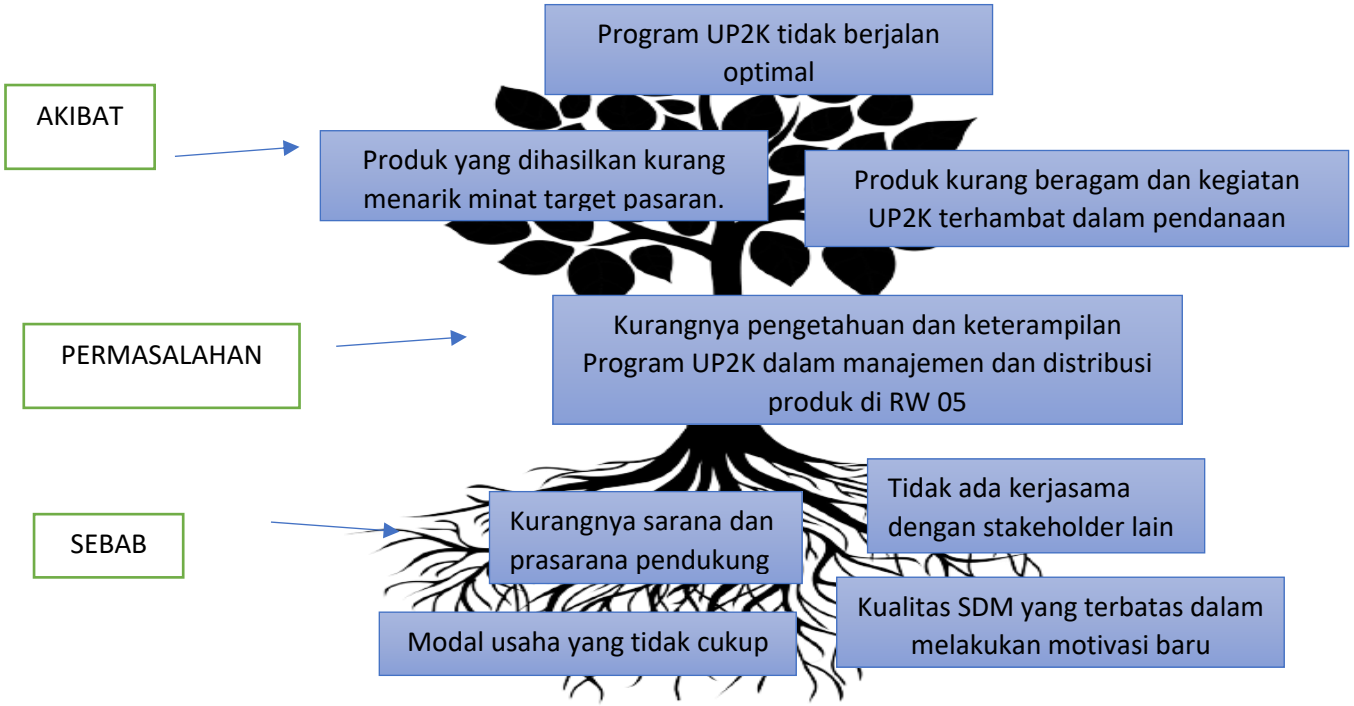

Gambar 17 Pohon Masalah Analis Pemberdayaan Lingkungan

1) **Penyebab Masalah**
   Penyebab permasalahan berdasarkan analisis pohon masalah ialah masyarakat RW 05 ini kurangnya pengetahuan dan keterampilan Program UP2K dalam manajemen dan distribusi produk.
2) **Dampak Masalah**
   Dampak permasalahan berdasarkan analisis pohon masalah yang ada diatas yaitu mengenai potensi pemanfaatan dari Program UP2K di RW 05 yang kurang optimal.
3) **Fokus Masalah**
   Berdasarkan analisis pohon masalah didapatkan fokus permasalahan, yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan Program UP2K dalam manajemen dan distribusi produk di RW 05.

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan permasalahan yang ada maka kebutuhan yang diperlukan atau dibutuhkan ialah perlunya diadakannya penyuluhan mengenai strategi membuat inovasi baru pada produk makanan/cemilan, dan pendampingan mencari sumber dana dan stakeholder pendukung.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Berdasarkan identifikasi kebutuhan, potensi dan sumber yang diperlukan sesuai permasalahan yang ada adalah :

1) Karang Taruna

Karang taruna merupakan organisasi untuk wadah generasi muda sebagai sarana partisipasi masyarakat untuk meningkatkan usaha kesejahteraan sosial. Di Kelurahan Sukapura, karang taruna tergolong aktif terbuktinya dengan partisipasinya dalam beberapa kegiatan seperti gotong royong, peringatan hari besar nasional, 17 Agustusan, dll.

2) PKK (Penggerak dan Kesejahteraan Keluarga)

Penggerak dan Kesejahteraan Keluarga adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintah untuk terlaksananya program PKK tersebut. PKK di Kelurahan Sukapura tergolong aktif dengan menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan penyuluh. PKK di Kelurahan Sukapura juga selalu mengadakan program pokok seperti gotong royong, sandang, pangan, kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat, penghayatan dan pengamalan pancasila, perumahan dan taat laksanan rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, dan pengembangan kehidupan beroperasi.

4. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

UP2K- PKK adalah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga merupakan segala kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh keluarga, baik secara perorangan maupun kelompok yang modalnya bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, bantuan luar negeri, swasta, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Usaha ekonomi keluarga juga merupakan suatu bentuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Rendahnya pendapatan keluarga merupakan hambatan dalam pencapaian kesejahteraan keluarga, oleh karena itu peningkatan usaha yang telah ada diharapkan dapat dioptimalkan semaksimal mungkin, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Ketersediaan bahan baku lokal yang tersedia juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung program UP2K. Program UP2K ini dilaksanakan dengan maksud agar setiap keluarga memiliki tata kehidupan dan penghidupan yang berkecukupan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memenuhi kebutihan hidupnya. Dari penjelasan tersebut maka diperlukan edukasi dan motivasi mengenai Program UP2K ini bagi keluarga dan peluang

potensi usaha serta pendampingan mencari sumber dana dan stakeholder pendukung agar berjalan secara optimal.

b. Tujuan Umun dan Khusus

1) Tujuan Umum

Tercapainya peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui usaha kelompok/perorangan UP2K-PKK, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

2) Tujuan Khusus

1. Meningkatkan pemahaman PKK dan Kader UP2K-PKK tentang pengelolaan dan pengembangan usaha ekonomi keluarga.
2. Meningkatkan kemampuan dan kualitas kerja PKK dan Kader dalam melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga yang dilakukannya.
3. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan PKK dan Kader untuk membina kelompok usaha ekonomi keluarga.
4. Menumbuhkan kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat dan atau pra koperasi dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga dan masyarakat.

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Nama program dari pemberdayaan ini adalah " *Capacity Building* atau Peningkatan Kapasitas Keluarga di RW 05 Kelurahan Sukapura melalui Program UP2K" yang meliputi penyuluhan mengenai Program UP2K ini bagi program dan peluang potensi usaha serta pendampingan mencari sumber dana dan stakeholder pendukung agar berjalan secara optimal.

Tabel 2. 14 Rencana Bentuk Kegiatan Program adalah " Capacity Building atau Peningkatan Kapasitas Keluarga di RW 05 Kelurahan Sukapura melalui Program UP2K"

Kegiatan Penyelesaian Masalah	Sasaran	Tujuan	Pelaksana	Penanggung Jawab	Jadwal Kerja	Sumber biaya
Penyuluhan terkait Program UP2K	Warga RW 05	Meningkatnya pengetahuan warga RW 05	Dinas sosial	Pekerja Sosial	1 hari	Kel. Sukapura
Pendampingan Stakeholder Pendukung	Warga RW 05	Mengembangkan kekuatan/kemampuan dengan potensi/sumber yang ada di masyarakat	Pekerja Sosial	Pekerja Sosial	7 hari	Kel. Sukapura
Pembentukan Kelompok UP2K	Warga RW 05	Meningkatnya kemampuan anggotanya	Pekerja Sosial	Pekerja Sosial	1 hari	Kel. Sukapura

d. Sistem Partisipan

Tabel 2. 15 Sistem Partisipan Program adalah " Capacity Building atau Peningkatan Kapasitas Keluarga di RW 05 Kelurahan Sukapura melalui Program UP2K"

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Initiator System	Pekerja Sosial
2.	Change Agent System	Pekerja Sosial
3.	Client System	PKK
4.	Support System	Masyarakat, pemerintah Kelurahan Sukapura, Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian, Dinas sosial
5.	Controlling System	Kelurahan Sukapura
6.	Implementing System	Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Bandung, Dinas sosial Kota Bandung, Masyarakat dan pemerintah Kelurahan Sukapura
7.	Target System	PKK
8.	Action System	Pekerja Sosial, Dinas sosial, Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian

e. Metode dan Teknik

Metode yang digunakan praktikan selama melaksanakan proses intervensi terhadap permasalahan yang ada adalah Pengembangan Masyarakat *(Community Development)* atau Pengembangan Organnisasi *(Community Organization). COCD* adalah suatu proses untuk memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat atau suatu bidang tertentu. Strategi yang digunakan ialah kolaboratif atau bekerjasama dengan pihak dan sistem lainnya untuk mengefektivitaskan pelaksanaan program.

Adapun beberapa teknik yang digunakan praktikan ialah :

1) Penyuluhan Sosial.
   Penyuluhan sosial adalah kegiatan yang dimaksudkan sebagi gerak dasar dan awal untuk bisa lebih memberikan kesiapan dan manfaat program bagi warga sasaran yang ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan, kepercayaan dan keyakinan akan perubahan serta kesadaran dari warga sasaran agar memiliki rasa tanggungjawan penuh dalam diri sendiri. Penyuluhan akan disampaikan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dengan adanya kegiatan tersebut, maka diharapkan adanya perubahan dari masyarakat.
2) *Focus Group Discussion* atau Diskusi Kelompok Terfokus

Teknik ini berupa diskusi antara beberapa orang untuk membicarakan hal-hal bersifat khusus secara mendalam. Tujuannya untuk memperoleh gambaran terhadap suatu masalah tertentu dengan lebih rinci. Tujuan dari metode ini sendiri yaitu untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik.

3) *Capacity Building*

Peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan sasaran terkait pengelolaan program dan potensi usaha program UP2K dalam manajemen dan distribusi produk. Serta pendampingan mencari dana dan stakeholder pendukung agar berjalan dengan optimal.

f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan

1) Alat

Tabel 2. 16 Alat yang dibutuhkan

No	Alat	Jumlah
1	Laptop	3
2	Kursi	40
3	Meja	4
4	Alat Tulis	4
5	LCD	1
6	Proyektor	1
7	Kamera	2
8	Sound System	1
9	Mikrofon	3

g. Rencana Anggaran Biaya

Tabel 2. 17 Rencana Anggaran Biaya Program adalah " Capacity Building atau Peningkatan Kapasitas Keluarga di RW 05 Kelurahan Sukapura melalui Program UP2K"

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Logistik					
1	Banner	1	Lembar	80.000,00	80.000,00
2	Sound System	1	Unit	150.000,00	150.000,00
3	ATK	4	Paket	50.000,00	200.000,00
Honorarium					
1	Dinas Sosial Kota.Bandung	1	Orang	900.000,00	900.000,00
2	Ahli perindustrian makanan	1	Orang	500.000,00	500.000,00
Konsumsi					
1	Snack Panitia	6	Box	10.000,00	60.000,00
2	Snack Tamu Undangan	6	Box	10.000,00	60.000,00
3	Snack Peserta	40	Box	10.000,00	400.000,00
Jumlah					**2.350.000,00**

h. Analisis Kelayakan Program

Tabel 2. 18 Analisis Kelayakan Program adalah " Capacity Building atau Peningkatan Kapasitas Keluarga di RW 05 Kelurahan Sukapura melalui Program UP2K"

Faktor Internal / Faktor Eksternal	**Kekuatan (Strength):** 1. Adanya kemauan dari masyarakat untuk maju danberkembang 2. Adanya narasumber yang tepatdan kompeten 3. Kegiatan didukung oleh masyarakat, pemerintah desa kelurahan Sukapura, Karang Taruna, PKK	**Kelemahan (Weakness):** 1. masih rendahnya pengetahuan dan ketermapilan masyarakat mengenai program UP2K 2. pengusaha belum tentubersedia untuk menjadi partner program UP2K
Peluang (Opportunity): Masyarkat dapat memanfaatkan Program UP2K	**Strategi SO:** 1. Melakukan kerja sama dengan pihak- pihak yang berkaitan dengan program UP2K pemerintah desa, pengusaha,maupun ahli. 2. Mengadakan kegiatan pendampingan program UP2K	**Strategi WO:** Mengadakan penyuluhan mengenai manajemen dan distribusi produk yang dihasilkan dalam program UP2K di RW 05.
Ancaman (Threats): Masyarakat belum mengetahui program UP2K secaara optimal	**Strategi ST:** Melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program UP2K..	**Strategi WT:** Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan hingga masaprogram berakhir.

Berdasarkan hasil analisis kelayakan program dengan menggunakan analisis SWOT dapat diketahui bahwa aspek kekuatan lebih banyak jika dibandingkan dengan aspek kelemahan. Dapat dilihat bahwa dari penggunaan metode dan teknik FGD merupakan hal yang tepat dan bisa membuat diskusi secara terfokus sehingga kelompok PKK dan Masyarakat mampu memahami apa yang disampaikan. Selain itu juga, adanya pendampingan selama kegiatan

pelatihan akan memudahkan sasaran dalam mengembangkan potensinya dan bebas untuk bertanya.

Kemudian kegiatan ini juga didukung oleh berbagi pihak. Hal ini sangat berkaitan dengan permasalahannya, tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan mampu memberdayakannya.

i. Jadwal dan Langkah-langkah

1) Pra Pelaksanaan
   (1) Membentuk tim dan Panitia kegiatan
   (2) Melakukan rapat dan menentukan rencana dan jadwal kegiatan
   (3) Menentukan materi dan narasumber
   (4) Mengurus izin kegiatan
   (5) Mempersiapkan alat, kebutuhan, tempat untuk kegiatan

2) Pelaksanaan
   (1) Penyuluhan tentang izin bantuan sosial
   (2) Mempastikan partisipan hadir
   (3) Mengajak partisipan untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi

Tabel 2. 19 Jadwal Kegiatan Program adalah " Capacity Building atau Peningkatan Kapasitas Keluarga di RW 05 Kelurahan Sukapura melalui Program UP2K"

No	Kegiatan	Narasumber	PJ	Waktu
1	Peningkatan Kapabilitasprogram UP2K	Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian.	Panitia	08.00-11.00
2	Pembentukan kelompok Program UP2K	Pekerja sosial dan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian	Pekerja sosial dan tim pekerja	11.00-12.00
3	Pendampingan stakeholder program UP2K	Pekerja sosial, tim pendamping	Tim pendamping	7 hari setiap pukul 09.00-12.00

3) Pasca Pelaksanaan

Di tahap akhir pekerja sosial, tim kerja penyuluhan, dan tim pendamping melakukan monitoring dan evaluasi. Untuk mengetahui apakah program tersebut berjalan dengan semestinya dengan menggunakan indikator keberhasilan. Setelah itu membuat laporan pertanggungjawaban dan pembubaran tim kerja serta tim pendamping.

j. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari program ini adalah :

1) Kader PKK dan masyarakat dapat memahami informasi yang diberikan dan dapat diaplikasikan dalam praktiknya.
2) Kader PKK mampu dan memberikan pelatihan lanjutan kepada kelompok kelompok miskin
3) Adanya inovasi baru terhadap produk yang dihasilkan
4) Mampu memberdayakan masyarakat terhadap produk yang dibuat dan menjadi meningkatkan perekonomian
5) Mampu menarik minat dan partisipasi menjadi target sasaran lebih banyak lagi.

D. Profil Analis Penataan Lingkungan

1. Gambaran Umum Masalah

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk dalamsehari-hari, sehingga dalam pemenuhannya harus optimum. Ketersediaan air bersih sangat bergantung pada sumber air bersih yang dapat diolah dan dimanfaatkan. Kondisi air yang ada di Kelurahan Sukapura khususnya di RW 10 masih terdapat di beberapa titik tempat tinggal warga dengan kualitas air kurang baik atau keruh.

Banyak warga yang mengeluhan kualitas air yang mereka gunakan sehari-hari masih keruh dan mengeluhkan sulitnya mengakses air bersih di permukimannya sendiri. Sebab, air yang ada di rumah-rumah warga itu berwarna coklat dan berbau sehingga bisa digunakan untuk mandi dan mencuci baju saja, itupun harus memakai filter.

Awal mulanya daerah Kelurahan Sukapura ini daerah hamparan sawah, namun seiring berjalanya waktu berubah menjadi wilayah administratif atau perkotaan. Banyak ruko, gedung, dan pabrik. Hal tersebut tentu merubah susunan tanah dan berpengaruh ke air tanah. Beberapa warga harus mencari sumber air bersih lainnya misalnya menunggu bantuan air bersih ataupun mengajukan ke PDAM setempat untuk menurunkan beberapa tangki air. Terlebih lagi disaat musim kemarau, banyak warga yang mengalami kekeringan. Dalam kehidupan sehari-hari, ketersediaan air bersih masih terbatas sehingga dapat mempengaruhi ke kesehatan dan ekonomi warga. Maka dari itu praktikan tertarik untuk mengangkat isu tersebut.

2. Tinajaun Konsep/Teori yang Relevan dengan Masalah

a. Konsep Lingkungan Sosial

1) Definisi Lingkungan Sosial\

Menurut Barnett dan Casper, Pengertian lingkungan sosial merupakan konteks sosial, konteks sosiokultural, atau milireu adalah sesuatu hal yang didefinisikan sebagai suasana fisik atau suasana sosial dimana manusia hidup di dalamnya, atau dimana sesuatu terjadi dan berkembang.

Lingkungan sosial tersebut bisa berupa kebudayaan atau kultur yang diajarkan atau dialami oleh seorang individu, atau juga manusia dan institusi yang berinteraksi dengan individu tersebut. (Barnett dan Casper, 2001:91).

Menurut Purba, Pengertian lingkungan sisuak adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungya macam-macam interaksi sosial antara berbagi kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai serta norma yang sudah mapan, serta tertait dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan atau buatan (tata ruang). (Purba, 2002:13-14).

2) Ciri-ciri Lingkungan Sosial

a) Segenap pihak diikutsertakan dan masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab
b) Hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas guba meningkatkan kesejahteraan hidupnya
c) Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat serta modal sosial yang dikembangkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup.

3) Jenis Lingkungan Sosial

a) Primer
Lingkungan sosial primer sejatinya terdapat hubungan sosial yang terjalin erat antara anggota satu dengan anggota lain, terjalin suatu hubungan saling kenal mengenal dengan baik dengan anggota lain.
b) Sekunder
Lingkungan sosial jenis ini di dalamnya terjalin suatu hubungan anggota satu dengan anggota lainnya secara agak longgar, tidak begitu intens, serta hanya berorientasi pada kepentingan-kepentingan formal maupun aktivitas-aktivitas khusus dalam kehidupan masyarakat.

b. Penataan Lingkungan Sosial

Berdasarkan pendapat dari Jonny Purba dalam bukunya Pengelolaan Lingkungan Sosial, mendefiniskan secara teoritis pengelolaan lingkungan sosial dapat diartikan sebagai upaya atau serangkaian tindakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengndalian/pengawasan, dan evaluasi yang bersifat komunikatif dengan mempertimbangkan :

a) Ketahanan sosial (daya dukung dan daya tampung sosial setempat)
b) Keadaan ekosistemnya
c) Tata ruangnya
d) Kualitas sosial setempat (kualitas objektif dan subjektif)
e) Sumber daya sosial (potensi) dan keterbatasan (pantangan) yang bersifat kemasyarakatan (yang tampak dalam wujud pranata, pengetahuan lingkungan, dan etika lingkungan).
f) Kesesuaian dengan azas, tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup.

c. Konsep Air Bersih

1) Definisi Air Bersih

Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantarnya sanitasi. Menurut Departemen Kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat risiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri.

2) Dasar Hukum Air Bersih

Menurut UU No.17 Pasal 6 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, menyebutkan bahwa " Negara menjamin hak rakyar atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau." Sehingga air bersih merupakan kebutuhan pokok semua makhluk hidup.

3. Asesmen

Praktikum laboratorium pada isu keempat yaitu Analis Penataan Lingkungan Sosial yang dilakukan pada tanggal 24 Maret – 4 April 2023. Praktikan memilih isu terkait permasalah air bersih di Kelurahan Sukapura tepatnya di RW 10 dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer di dapatkan melalui wawancara. Kemudian praktikan juga menggunakan data sekunder melalui internet seperti portal berita Tribun, Kompas, Ayobandung. Teknologi asesmen yang digunakan dengan analisis pohon masalah. Analisis pohon masalah adalah metode untuk mengidentifikasi semua masalah dalam situasi tertentu dan memperagakannya sebagai rangkaian hubungan sebab akibat. Penyusunan analisis pohon masalah membantu untuk menemukan solusi dengan memetakan sebab akibat disekitar masalah utama untuk membentuk pola pikir dengan lebih struktur

a. Identifikasi Masalah

Tanggal 17 Maret 2023 pukul 14.00 WIB praktikan melakukan praktik menggunakan metode MPA di RW 10 Kel. Sukapura terkait analis penataan lingkungan sosial dan penanggulangan bencana. MPA (*Methode Participatory Assesment)* yaitu teknik atau metode pengembangan masyarkat dengan memfasilitasi masyarakat untuk mengidentifikasi situasi, kondisi, masalah sosial yang dialami oleh masyarakat setempat dan mengetahui penyebab dari permasalahan tersebut serta mengidentifikasi potensi dan sumber yang dimiliki.

Tujuan dari melakasankan kegiatan MPA ini, yaitu:

a) Mengidentifikasi masalah/kebutuhan komunitas dan sumber yang tersedia.
b) Memahami hubungan sebab akibat.

c) Mencari dan menemukan masalah khusus yang ada di wilayah tersebut.
d) Mengajak masyarakat mendefinisikan masalah/kebutuhan mereka.
e) Fasilitator untuk memberikan penguatan tentang definisi masalah atau kebutuhan yang dikemukakan masyarakat.

Gambar 18 Praktik MPA

Pada tanggal 30 Maret 2023 pukul 13.51 WIB praktikan melakukan wawancara dengan Ibu F selaku Ketua RW 10 mengenai isu keterbatasan air bersih di lingkungan RW 10. Dari hasil wawancara, praktikan mendapatkan informasi bahwa warga menggunakan sumber air ledeng dan sumur. Di Kelurahan Sukapura tercatat 450 KK menggunakan ledeng, dan 142 menggunakan sumur. Kondisi air yang ada di Kelurahan Sukapura masih terdapat di beberapa titik tempat khususnya di RW 10 kualitas air yang kurang baik atau keruh dan berbau, karena masih ada warga yang menggunakan air sumur yang berdekatan dengan selokan. Dan jika ingin mendapatkan air bersih ada warga juga yang menggunakan PDAM, namun sistematika nya jika menggunakan PDAM air nyala nya pada pukul 14.00 WIB dan berhenti pada pukul 22.00 WIB. Banyak warga yang tidak mau menggunakan PDAM karena pada saat pemasangan harus membayar sebesar 3,5 juta.

Gambar 19 melakukan wawancara dengan Ibu F

Gambar 20 kondisi air di salah satu rumah warga di RW 10

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai identifikasi masalah yang ada pada Kelurahan Sukapura khususnya di RW 10, praktikan dapat menjelaskan disini melalui analisis pohon masalah sebagai berikut.

Analisis Pohon Masalah

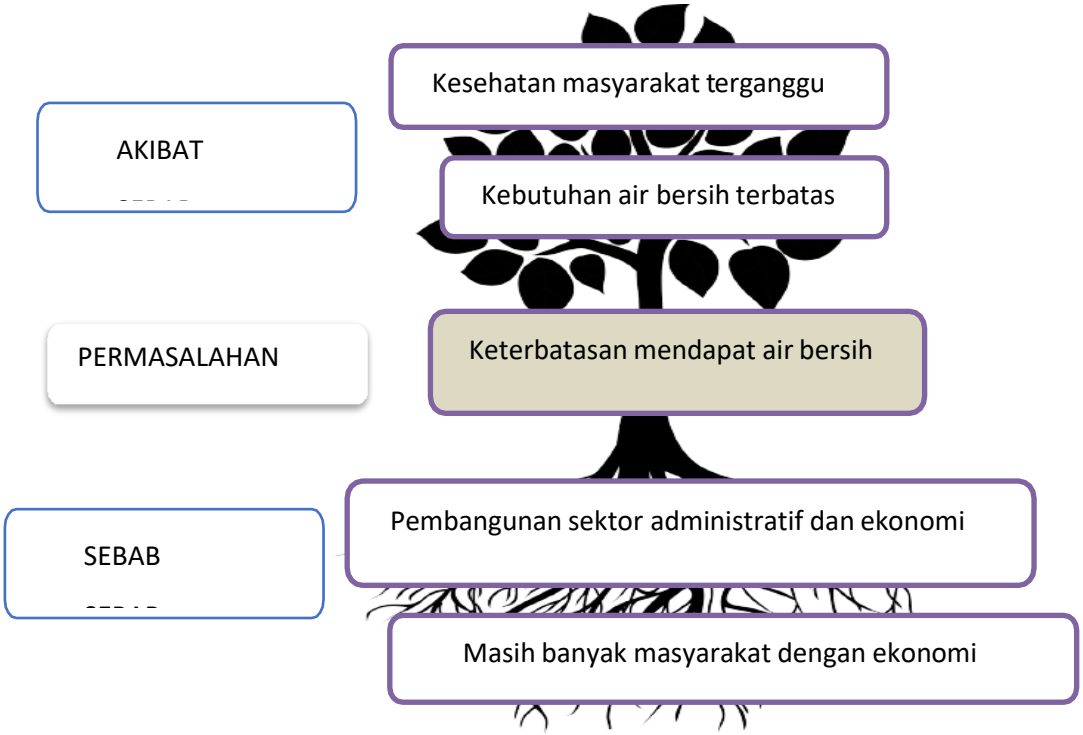

Gambar 21 Pohon Masalah Analis Penataan Lingkungan

1) **Penyebab Masalah**
   a) Pembangunan sektor administrartif dan ekonomi
   Wilayah Kelurahan Sukapura memili banyak hamparan oersawahan, namum seiring berjalannya waktu banyak pembangunan sektor-sektor di wilayah tersebut. Misalnya, pembangunan wilayah administratif (perkantoran, gedung) dan pembangunan sektor ekonomi (ruko, pasar, swalayan, pabrik). Perubahan tersebut tentu saja sangat mempengaruhi persediaan air bersih.
   b) Masih banyak masyarakat dengan ekonomi rendah yang tidak bisa menggunakan PDAM.
   Tidak semua warga memiliki kelas ekonomi menengah keatas, masih terdapat beberapa warga yang tergolong kelas ekonomi menengah kebawah, sehingga tidak mampu untuk mengakses PDAM karena keterbatasan biaya. Padahal kebutuhan air bersih sangat penting untuk kelangsungan hidup.
2) **Dampak Masalah**
   a) Kesehatan masyarakat terganggu
   Masyarakat menjadi rentan terkena penyakit terutama penyakit kutu air, dermatitis alergi, gatal-gatal, tifus. Kualitas air tentu sangat penting bagi kesehatan manusia.
   b) Terbatasnya kebutuhan air bersih bagi kehidupan sehari-hari.

Pembangunan berbagai sektor administratif dan ekonomi memberikan dampak yang besar terhadap kebutuhan untuk hidup. Persediaan air bersih di alam menjadi minim sehingga masyarakat harus bisa lebih menghemat pemanfaatnnya. Tak hanya itu, kualitas air juga mengalami penurunan misalnya, bau maupun kotor.

3) **Fokus Masalah**

Berdasarkan analisis pohon masalah diatas praktikan mengangkat isu terkait keterbatasan mendapatkan air bersih di RW 10 Kelurahan Sukapura.

b. Identifikasi Kebutuhan

Masyarakat di Kelurahan Sukapura khususnya di RW 10 memerlukan inovasi dalam menangani permasalahan terkait air bersih ini. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang layak. Kebutuhan akan air bersih dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan, misalnya pada kegiatan penyuluhan seperti bagaimana membuat tandon buatan sebagai alternatif penyimpanan air. Pada kegiatan tersebut masyarakat dapat mendapatkan informasi dan juga belajar terkait penjelasan tandon, bagaimana pembuatannya, dan bagaimana pemeliharaannya.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Berdasarkan identifikasi kebutuhan, maka potensi dan sumber yang diperlukan sesuai permasalahan yang ada yaitu :,

1) Dinas Kesehatan

Memiliki peran penting terutama dalam pemberian informasi terkait penyakit-penyakit dan bahaya yang dapat ditimbulkan dari air kotor. Sehingga menajdi sumber informasi kesehatan.

2) PDAM

Pada kegiatan ini PDAM memiliki peran penting terutama dalam pembuatan tandon, pemeliharaan tandon, dan pendistribusian atau penyuplai air bersih. PDAM dapat dimanfaatkan sebagai sistem sumber dengan pemberian penyuluhan.

3) Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah juga menjadi potensi bagi para masyarakat karena wilayah RW berada di bawa daerah sehingga pihak pemerintah daerah pun memiliki andil dalam penyediaan air bersih. Dan pengajuan apapun harus lewat pemerintah daerah lalu naik ke atas yaitu ke dinas.

4. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Air bersih di Kelurahan Sukapura khususnya di RW 10 masih tergolong kurang. Kondisi air yang ada tergolong buruk karena kotor ataupun keruh dan mengeluarkan bau. Hal tersebut tentunya berdampak pada kesehatan masyarakat terlebih pada balta. Beberapa kali warga sempat membeli air dengan membayar jasa namun apabila dilakukan berkali-kali maka uang yang

dikeluarkan akan cukup besar. Bagi masyarakat dengan kelas ekonomi menengah kebawah tentu saja menjadi hambatan dan dikeluhkan. Rata-rata kondisi air memang mengalami hal serupa yaitu air keruh dan bau. Pada kenyataannya masyarakat belum menemukan alternatif penyelesaian sehingga praktikan mengangkat isu terkait keterbatasan masyarakat untuk mendapatkan air bersih. Rencana intervensi yang akan digunakan ialah dengan melakukan penyuluhan terkait cara pembuatan tandon dan perawatannya.

a. Tujuan Umum dan Khusus

1) Tujuan Umum
   Untuk mengurangi permsalahan kekurangan air bersih di Kelurahan Sukapura
2) Tujuan Khusus
   a) Memberikan informasi kepada masyarakat terkait pembuatan tandon mandiri
   b) Memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana perawatan tandon mandiri.
   c) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat terkait pembuatan tandon mandiri.

b. Bentuk Kegiatan dan Program

Bentuk kegiatan ini nantinya akan dilakukan suatu kegiatan penyuluhan yang dapat membantu masyarakat dalam mencari alternatif penyelesaian masalah dalam ketersediaan air bersih di Kelurahan Sukapura khususnya di RW 10. Dengan nama program "Peningkatan Kemampuan Pembuatan dan Perawatan Tandon Mandiri di RW 10 Kelurahan Sukapura". Kegiatan yang ada di dalam penyuluhan nantinya berisi mengenai penjelasan tentang tandon, cara pembuatan, dan cara perawatannya.

Tabel 2. 20 Rencana Bentuk Kegiatan Program "Peningkatan Kemampuan Pembuatan dan Perawatan Tandon Mandiri di RW 10 Kelurahan Sukapura".

Kegiatan Penyelesaian Masalah	Sasaran	Tujuan	Pelaksana	Penanggung Jawab	Jadwal Kerja	Sumber biaya
Pembentukan Grup WAwarga dan stakeholder Terkait	Warga RW 10	Meningkatnya Komunikasi	Pekerja Sosial	Ketua RW	1 hari	Kelurahan Sukapura
Penyuluhan mengenai tandon, cara perawatan,	Warga RW 10	Meningkatnya pengetahuan warga	PDAM	Lurah	1 hari	Kelurahan Sukapura
Cara pembuatan tandon	Warga RW 10	Pembuatan dan perawatan tandon mandiri	PDAM	Lurah	1 hari	Kel. Sukapura
Monitoring dan evaluasi	Warga RW 10	Melihat perkembangan program	PDAM. Pemerintah Daerah	Lurah	1 hari	Kel. Sukapura

c. Sistem Partisipan

Tabel 2. 21 Sistem Partisipan Program "Peningkatan Kemampuan Pembuatan dan Perawatan Tandon Mandiri di RW 10 Kelurahan Sukapura".

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1	Inisiator Sistem	Pekerja Sosial
2	Change Agent System	Pekerja Sosial, PDAM, Pemerintah daerah
3	Client System	Masyarakat Kelurahan Sukapura
4	Support System	Pemerintah daerah, Karang Taruna. PDAM
5	Controlling System	Kelurahan Sukapura
6	Implementing System	Pekerja Sosial, PDAM
7	Target System	Warga RW 10 Kelurahan Sukapura
8	Action System	Pekerja Sosial, PDAM, Pemerintah Daerah

d. Metode dan Teknik

Metode yang digunakan dalam program ini adalah *Community Organization/Community Development* (CO/CD) yaitu pengmbangan masyarakat dan organisasi. Adalah suatu proses untuk memelihara keseimbangan anatara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat tertentu atau suatu bidang kegiatan tertentu.Ini dilakukan untuk melakukan perubahan terencana yang diarahakan tingkat komunitas dan masyarakat.

Adapun teknik yang digunakan praktikan yaitu

1) Penyuluhan Sosial.
   Penyuluhan Sosial adalah sebuah proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasa informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial, baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran, sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna partisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Selanjutnta diimplementasikan dengan teknik penyuluhan sosial mengenai penjelasan terkait tandon, pembuatan, dan perawatannya.
2) *Capacity Building*
   Peningkatan kapasitas pengetahuan dan keteramplan sasaran terkait pembuatan tandon ini.
3) Monitoring dan Evaluasi

Monitor merupakan kegiatan pemantauan terhadap semua kegatan yang telah dilaksanakan. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan atau perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai dampak kegiatan yang telah diterapkan. Evaluasi ini dilakukan baik selama proses kegiatan maupun pada akhir program. Tujuan dari Monitoring dan Evaluasi ini adalah umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan serta untuk mengetahui kesenjangan anatara perencanaan dan target.

e. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Digunakan

1) Alat

Tabel 2. 22 Alat yang dibutuhkan

No	Alat	Jumlah
1	Laptop	5
2	Kursi	30
3	Alat tulis	30
4	LCD	2
5	Proyektor	2
6	Sound System	2
7	Microphone	2

2) Rencana Anggaran Biaya

Tabel 2. 23 Rencana Aggaran Biaya Program "Peningkatan Kemampuan Pembuatan dan Perawatan Tandon Mandiri di RW 10 Kelurahan Sukapura

Uraian	**Volume**	**Satuan**	**Harga Satuan**	**Jumlah**
Logistik				
Banner Kegiatan Penyuluhan	1	Lembar	80.000,00	80.000,00
Sound System	2	Unit	150.000,00	300.000,00
ATK	30	Paket	30.000,00	900.000,00
Honorarium				
PDAM Kota Bandung	2	Orang	500.000,00	1.000.000,00
Konsumsi				
Snack Peserta	40	Box	10.000,00	400.000,00
Snack Panitia	7	Box	10.000,00	70.000,00
Snack Tamu Undangan	5	Box	10.000,00	50.000,00
Jumlah				2.800.000,00

f. Analisis Kelayakan Program

Tabel 2. 24 Analisis SWOT Analis Penataan Lingkunga

Faktor Internal / Faktor Eksternal	**Kekuatan (Strength):** 1. Adanya kemauan masyarakat untuk memahami pembuatan dan perawatan tandon buatan. 2. Adanya partisipasi dari pemerintah daerah setempah terhadap program, karang taruna dan PKK	**Kelemahan (Weakness):** 1. Jangka waktu pembuatantandon relatif lama 2. Anggaran biaya pelaksanaanprogram cukup besar
Peluang (Opportunity) 1. Adanya narasumber yang kompeten. 2. Karang taruna ikut berpartisipasi aktif	**Strategi SO:** Memanfaatkan karang taruna sebagai peggerak dan melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah.	**Strategi WO:** Memanfaatkan karang taruna secara optimal untuk mempersingkat waktu dan jangka waktu tandon bertahan lama.
Ancaman (Threats): 1. Harga bahan baku mahal 2. Alat dan bahan pengolahan kapan saja dapat mengalami kerusakan 3. Cuaca yang tidak menentu saat proses pembuatan tandon	**Strategi ST:** adanya dukungan pemerintah sehingga beban biaya pembuatan berkurang serta pemerintah daerah dapat membuat penjadwalan pengambilan air dan perawatan tandon	**Strategi WT:** Membuat proposal untuk diajukandan melakukan pengecekan tandon secara berkala

Berdasarkan hasil analisis kelayakan Program dan Peningkatan Kemampuan Pembuatan dan Perawatan Tandon Mandiri di Kelurahan Sukapura dengan menggunakan analisis SWOT dapat diketahui aspek kekuatan lebih banyak apabila dibandingkan dengan aspek kelemahan. Karena dengan adanya partisipasi aktif dari karang taruna dengan melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah bisa menjadi motivasi warga agar ikut dan bisa memperbaiki permasalahan yang ada.

Sementara itu, untuk kelemahan dari kegiatan ini mengenai biaya untuk membeli bahan baku dan cuaca yang tidak menentu, dengan adanya dukungan pemerintah daerh sehingga untuk mengenai biaya pembuatan tandon ini berkurang serta pemerintah Kelurahan Sukapura dapat membuat penjadwalan pengambilan air dan perawatan tandon tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa, program dan peningkatan kemampuan pembuatan dan perawatan tandon mandiri di Kelurahan Sukapura layak untuk dilaksanakan.

g. Jadwal dan Langkah-langkah

1. Jadwal

Tabel 2. 25 Jadwal Program "Peningkatan Kemampuan Pembuatan dan Perawatan Tandon Mandiri di RW 10 Kelurahan Sukapura"

No	Program Penyelesaian Masalah	Sasaran	Pelaksana	Tujuan	Waktu
1	Pembentukan Grup WA warga dan stakeholder	Warga RW 10 Kelurahan Sukapura	Karang Taruna dan Pekerja Sosial	Meningkatkan komunikasi	1 hari
2	Sosilisasi dan penyuluhan	Warga RW 10 Kelurahan Sukapura	Masyarakat, Stakeholer, Karang Taruna	Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan warga terkait pembuatan, perawatan tandon mandiri sebagai altenatif pemecahan masalah air bersih di Desa	1 hari
3	Monitoring dan Evaluasi	Warga RW 10 Kelurahan Sukapura	Pemerintah Daerah dan Stakeholder	Melihat perkembangan pelaksanaan program	7 hari

2. Langkah-langkah :

a. Pra pelaksanaan

1) Identifikasi peserta kegiatan. Warga RW 10 yang menjadi sasaran utama pelaksanaan program.

2) Identifikasi Stakeholder. Stakeolder yang terlibat ialah pemerintah daerah dan PDAM Kota Bandung.
3) Penyiapan materi. Materi yang akan digunakan untuk melaksanakan penyuluhan di RW 10 Kelurahan Sukapura ialah cara pembuatan tandon dan cara perawatannya secara mandiri
4) Pembentukan grup melalui Whatsapp. Hal ini bertujuan untuk mempermudah komunikasi dan persiapan program.
5) Penetapan narasumber. Narasumbernya yaitu pihak PDAM Kota Bandung.
6) Penentuan dan penyiapan lokasi kegiatan. Lokasi yang akan di digunakan di kantor RW 10 Kelurahan Sukapura.

b. Pelaksanaan

Tabel 2. 26 Pelaksanaan Program "Peningkatan Kemampuan Pembuatan dan Perawatan Tandon Mandiri di RW 10 Kelurahan Sukapura".

No	Waktu	Kegiatan	Pengisi Acara	Penanggungjawab
1	07.30-08.00	Persiapan	Divisi Acara	Divisi Acara
2	08.00-08.10	Pembukaan oleh MC	MC	Divisi Acara
3	08.10-08.15	Sambutan Kepala Lurah	Kepala Lurah	Divisi Acara
4	08.15-09.15	Pemaparan Materi penjelasan mengenai Tandon Buatan	PDAM Kota Bandung	Divisi Acara dan Divisi Humas
5	09.15-09.30	Sesi Tanya Jawab	PDAM Kota Bandung	Divisi Acara dan Divisi Humas
6	09.30-10.30	Pemaparan Materi Cara Perawatan Tandon Buatan	PDAM Kota Bandung	Divisi Acara dan Divisi Humas
7	10.30-10.45	Sesi Tanya Jawab	PDAM Kota Bandung	Divisi Acara dan Divisi Humas
8	10.45-10.50	Dokumentasi	Divisi Pubdekdok	Divisi Pubdekdok
9	10.50-11.00	Penutup	MC	Divisi Acara

c. Pasca pelaksanaan

1) Melakukan monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pekerja Sosial, dan PDAM Kota Bandung.
2) Menyusun laporan pertanggungjawaban secara tertulis dari pelaksanaan program. Pelaporan ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan program-program selanjutnya.

h. Indikator Keberhasilan

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Program Peningkatan Kemampuan Pembuatan dan Perawatan Tandon Mandiri di Kelurahan Sukapura maka disusun indikator keberhasilan sebagai berikut.

a. Meningkatnya pengetahuan mengenai cara pembuatan tandon
b. Meningkatnya pengetahuan mengenai cara perawatan tandon
c. Terciptanya tandon di RW 10 Kelurahan Sukapura
d. Tidak kesulitan air bersih

E. Profil Analis Penanggulangan Bencana

1. Gambaran Umum Masalah

Gorong-gorong merupakan saluran air yang sangat bermanfaat bagi lingkungan di masyarakat. Dengan adanya gorong-gorong masyarakat harus bertanggungjawab menjaga dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi banjir karena tersumbat atau meluap. Tersumbatnya saluran air yang biasanya dikarenakan masyarakat yang sering membuang samaph ke gorong-gorong atau saluran air lainnya sehingga sampah plastik atau sampah organik menyumbat saluran air akibat sampah yang terlalu banyak.

Di RT 05 RW 10 Kelurahan Sukapura sering terjadi genangan yang disebabkan oleh air hujan. Genangan tersebut mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat sekitar dan para pengguna jalan. Banyak warga yang sering komplain ke RW jika terjadi banjir setelah hujan. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran warga terhadap membuang sampah sembarangan.

Praktikan tertarik mengangkat isu terkait kurangnya kesadaran warga mengenai membuang sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan banjir. Rencana intervensi yang akan dilakukan bertujuan untuk mencapai agar di wilayah tersebut tidak adalagi banjir atau air meluap akibat saluran air yang tersumbat oleh sampah.

2. Tinjauan Konsep/Teori yang Relevan dengan Masalah

1) Konsep Bencana
   a. Definisi Bencana

      Definisi bencana menurut UU No. 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

      Bencana memiliki sumber atau penyebab, berdasarkan sumber atau penyebabnya, *united national for development (UNDP)*

mengelompokkan bencana atas 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

1) Bencana alam *(natural disaster)* antara lain berupa gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
2) Bencana non alam, antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, dan kegiatan keantariksaan.
3) Bencana sosial antara lain berupa kerusakan dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi termasuk bencana akibat peperangan.

b. Manajemen Penanggulangan Bencana

Tyas (2016) dalam Rofifah (2019) menyebutkan bahwa manajemen penanggulangan bencana merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kegiatan penanggulangan bencana sesaui pada siklus bencana. Siklus bencana dibagi menjadi tiga diantarnya fase pra bencana disebut sebagai fase kesiapsiagaan yang terdiri atas pencegahan dan mitigasi *(prevention and mitigation),* fase bencana disebut sebagai fase tanggap darurat *(response)* yang terdiri atas fase akut *(acute phase)* serta fase sub akut *(sub acute phase)* dan yang terakhit adalah fase pemulihan atau perbaaikan *(recovery phase)* dan fase rehabilitas atau rekontruksi *(rehabilitation or reconstructions phase).*

Kesiapsiagaan (*preparedness*) adalah aktivitas serta yang diambil sebelum bencana untuk memastikan respon yang efektif terhadap dampak dari bencana, contohnya berupa memberikan peringatan dini yang tepat dan efektif serta dengan mengevakuasi penduduk dan harta benda dari lokasi yang terancam. Beberapa kegiatan kesiapsiagaan meliputi :

1) Peringatan dini Sebagai pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

2) Mitigasi (*mitigation*) Langkah struktural dan non struktural yang dilakukan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Tindakan mitigasi dilihat dari sifatnya dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif.

Tahap tanggap darurat merupakan tindakan atau pengarahan pertolongan untuk membantu masyarakat atau komunitas yang mengalami bencana, guna mengantisipasi bertambahnya korban jiwa. Dari sudut pandang pelayanan medis, bencana terbagi menjadi “fase akut” dan “fase sub akut”. Pada fase akut, 48 jam pertama sejak kejadian bencana dinamakan “fase penyelamatan dan pertolongan/pelayanan medis darurat” kegiatan yang dilakukan adalah penyelamatan dan pertolongan baik berupa tindakan medis darurat terhadap korban luka. Satu minggu setelah terjadinya bencana disebut dengan “fase sub akut” kegiatan yang dilakukan adalah perawatan terhadap orang-orang yang terluka saat mengungsi atau di evakuasi, serta dilakukan intervensi terhadap munculnya permasalahan kesehatan selama dalam pengungsian.

Tahap pemulihan berupa tahap rehabilitasi dan rekontruksi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan kepada kondisi normal. Tahap rekontruksi merupakan tahap yang bertujuan untuk membangun kembali saran dan prasaran yang rusak akibat bencana.

c. Konsep Bencana Banjir

1) Pengertian Banjir

Banjir adalah dimana suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu besar. Biasanya banjir terjadi karena adanya peningkatan volume air di suatu badan air seperti sungai dan danau, sehingga menjebol bendungan atau air keluar dari batasan alaminya sehingga merendam daratan (Ramli, 2019:98).

2) Jenis-jenis Banjir

Jenis-jenis banjir dalam buku Pedoman Latihan Kesiapsiagaan Bencana Nasional (2018:75) terdapat beberapa jenis banjir diantaranya :

1. Banjir Air Sungai merupakan banjir yang disebabkan oleh meluapnya air sungai.
2. Banjir Air Danau merupakan banjir yang disebabkan oleh meluapnya air danau.
3. Banjir Bandang merupakan banjir di daerah permukaan rendah akibat hujan yang turun secara terus menerus. Banjir bandang muncul secara tiba-tiba yang dikarenakan banyaknya air yang ada di suatu tempat. Banjir bandang terjadi akibat penjenuhan air yang berada diwilayah tersebut yang berlangsung secara cepat, sehingga tanah tidak mampu lagi untuk menyerap air.
4. Banjir Lumpur adalah peristiwa penyemburan lumpur panas dari dalam perut bumi menuju permukaan bumi.

5. Banjir Missoula adalah banjir yang bersifat periodik dan terjadi di wilayah Amerika Serikat. Banjir ini terjadi pada musim dingin dan musim semi. 6) Banjir Laut Pasang atau Banjir Rob adalah banjir yang terjadi antara lain akibat pasangnya air laut, adanya badai atau gempa bumi seperti tsunami.

3) Faktor Penyebab Banjir

Menurut Ramli (2010: 99) terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan banjir, diantaranya:

1. Curah hujan tinggi yang menyebabkan debit air sungai lebih besar dari biasanya bahkan bisa melebihi kapasitas sungai.
2. Pengaruh fisiografi/geofisik sungai seperti bentuk sungai, fungsi daerah kemiringan sungai, geometrik hidrolik (bentuk penampang seperti lebar, kedalaman, potongan memanjang, material dasar sungai), lokasi sungai dan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya banjir.
3. Topografi dapat mengalirkan air dari daerah yang tinggi ke daerah yang lebih rendah. Daerah-daerah dataran rendah atau cekungan, merupakan salah satu karakteristik wilayah banjir atau genangan.
4. Permukaan tanah lebih rendah dibandingkan permukaan air laut karena diakibatkan konsolidasi lahan, beban bangunan terlalu berat, pengambilan air tanah yang berlebihan dan pengerukan di sekitar pantai.
5. Banyak pemukiman yang di bangun pada dataran sepanjang sungai yang seharusnya dataran banjir dibebaskan dari pembangunan.
6. Aliran sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah serta bangunan di pinggir sungai sehingga alir menghambat aliran air dan memperdangkal permukaan sungai.
7. Kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai dan di daerah aliran sungai (DAS), karena banyaknya alih fungsi lahan sehingga kurangnya vegetasi menyebabkan terjadi erosi yang berlebihan dan terjadinya sedimentasi yang berlebihan sehingga mengurangi kapasitas sungai.
8. Perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat, sistem pengendalian yang tidak tepat bahkan dapat menambah kerusakan saat banjir.
9. Kerusakan bendungan dan bangunan pengendali banjir, penelitian yang kurang memadai menimbulkan kerusakan dan akhirnya tidak berfungsi dapat meningkatkan banjir lebih besar.

4) Dampak Banjir

1. Merusak Sarana dan prasarana (rumah, mobil, gedung, harta benda, dll) dan untuk mengganti atau memperbaikinya memerlukan biaya

2. Melumpuhkan jalur transportasi dan komunikasi, banjir dapat melumpuhkan transportasi karena menggenang jalur yang dipakai, dan banjir dapat melumpuhkan komunikasi karena saat ini masyarakat sangat bergantung pada internet dan listrik, sedangkan jika terjadi banjir, sarana dan prasarana yang mendukung komunikasi akan rusak.
3. Membuat terhentinya aktivitas manusia karena manusia akan kesulitan untuk beraktifitas dalam keadaan banjir.
4. Mencemari lingkungan seperti lingkungan menjadi kotor dan dapat menyisakann banyak lumpur.
5. Banjir dapat menyebabkan erosi dan memicu timbulnya bencana lain.

5) Upaya Penanggulangan Banjir
1. Penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan.
2. Pembangunan sistem pemantauan dan peringatan dini pada bagian sungai yang sering menimbulkan banjir
3. Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta daerah banjir sehingga air sungai tidak meluap ke pemukiman.
4. Tidak membuang sampah ke dalam sungai dan selokan yang menjadi penyebab utama pendangkalan dan tersumbatnya aliran sungai.
5. Mengadakan Program Pengukuran sungai.
6. Pemasangan Pompa untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut.
7. Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu di laksanakan serta mengurangi aktifitas dibagian sungai rawan banjir.

3. Asesmen

Praktikum laboratorium pada isu kelima yaitu Analis Penanggulangan Bencana yang dilakukan pada tanggal 5-12 April 2023. Praktikan memilih isu terkait bencana banjir yang terjadi di RT 05 RW 10 Kelurahan Sukapura yang disebabkan oleh gorong-gorong tersumbat sampah karena masyarakat banyak membuang sampahnya ke gorong-gorong. Praktikan menggunakan data sekunder dan data primer. Data primer di dapatkan melalui wawancara. Kemudian praktikan juga menggunakan data sekunder melalui internet seperti portal berita Tribun, Kompas, Ayobandung, Kompas TV, Liputan 6, Breaking News. Teknologi asesmen yang akan digunakan oleh praktikan yaitu Analisis Pohon Masalah. Analisis pohon masalah merupakan suatu metode untuk mengidentifikasi semua masalah dalam situasi tertentu dan memperagakannya sebagai rangkaian hubungan sebab akibat. Penyusunan analisis pohon masalah ini sangat membantu untuk menemukan solusi dengan memetakan sebab akibat disekitar masalah utama untuk membentuk pola pikir dengan lebih struktur.

a. Identifikasi Masalah

Salah satu faktor permasalahan lingkungan adalah pencemaran lingkungan yang bersumber dari sampah yang diakibatkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan. Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang memerlukan penanganan serius. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di suatu wilayah maka juga mengakibatkan bertambahnya volume sampah

Kelurahan Sukapura tepatnya di RT 05 RW 10 merupakan salah satu daerah yang sering mengalami genangan pada saat musim hujan. Daerah tersebut pada dasarnya sudah memiliki sistem drainase namun pada saat musim hujan masih terjadi genangan. Genangan tersebut mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat sekitar dan para pengguna jalan.

Pada tanggal 6 April 2023 pada pukul 15.30 WIB tepatnya di aula Kelurahan Sukapura, praktikan melakukan wawancara dengan Bapak B selaku ketua RT 05. Di dapatkan informasi bahwa banyak warga yang membuang sampah ke sungai atau ke gorong-gorong yang menyebabkan gorong-gorong tersumbat dan bila terjadi hujan, air akan meluap dan terjadi banjir. Hal ini disebabkan oleh masyarakat itu sendiri, karena kurangnya kesadaran akan lingkungan yang bersih dan tidak ada sanksi yang tegas untuk masyarakat yang membuang sampah sembarangan tersebut.

Gambar 22 sedang melakukan wawancara dengan Bapak B

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai identifikasi masalah yang ada pada Kelurahan Sukapura khususnya di RW 10, praktikan dapat menjelaskan disini melalui analisis pohon masalah sebagai berikut

Gambar Analisis Pohon Masalah

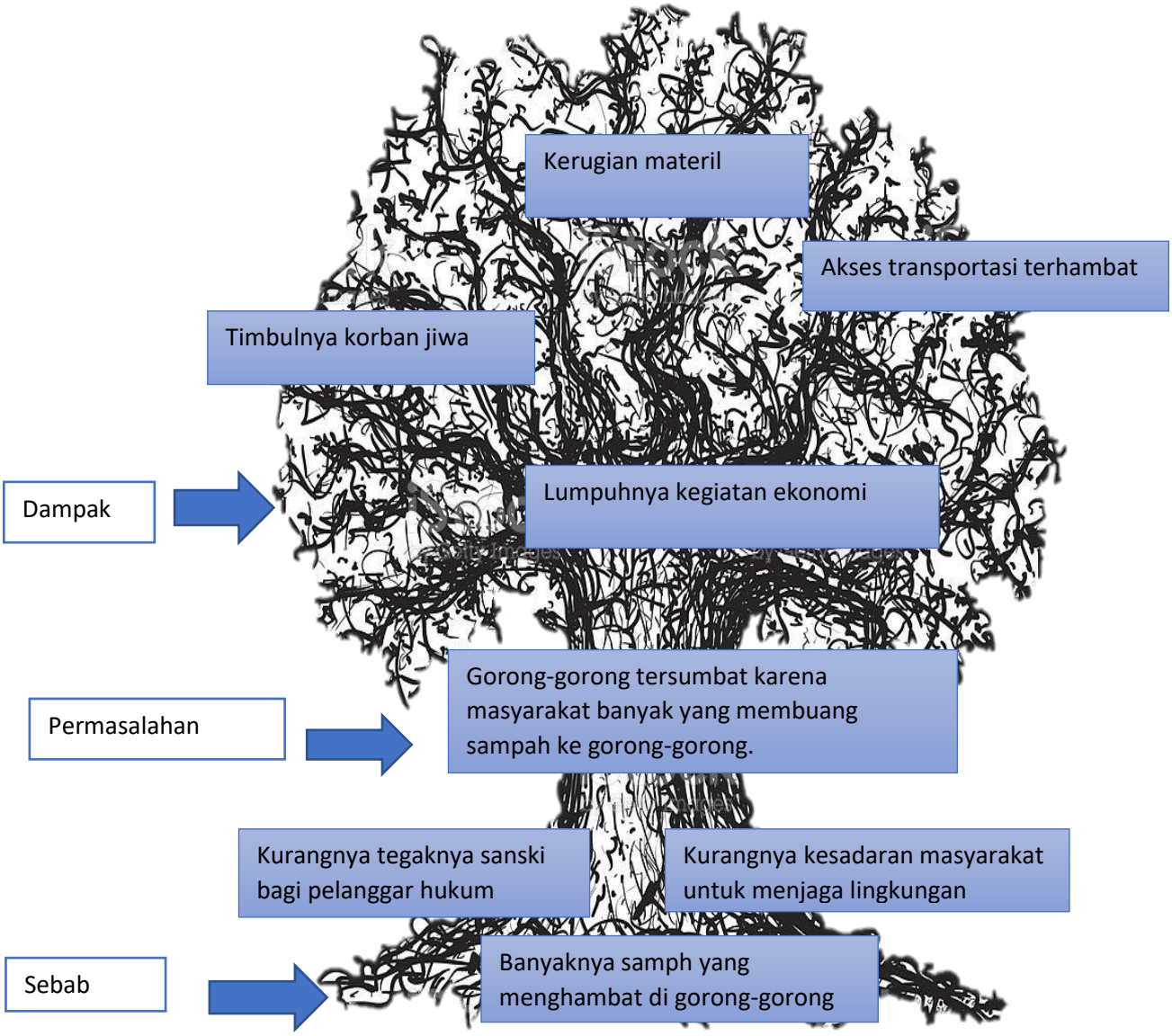

Gambar 23 Pohon Masalah Analis Penanggulangan Bencana

1) Penyebab Masalah

a. Kurangnya kesadaran untuk menjaga lingkungan.

Kesadaran masyarakat menjadi hal yang sangat penting terkait problematika banjir di Kota Bandung. Pola pikir masyarakat sebagai pelaku sekaligus korban banjir masih belum terbentuk. Walaupun sebagian sadar akan bahaya dan akibat dari banjir, sebagian lainnya masih kurang peduli. Bahkan beberapa aktivitas masyarakat seperti membuang sampah sembarangan dan membangun bangunan di samping sungai seakan sudah menjadi budaya. Kedua hal tersebut menjadi salah satu contoh faktor penyebab banjir di Kota Bandung. Jika masyarakat bersama-sama sadar akan pentingnya pencegahan terhadap faktor penyebab banjir mulai dari skala kecil, problematika banjir akan lebih mudah untuk diatasi. (Nurhaimi. A.R, Rahayu Sri., 2014)

b. Banyaknya sampah yang menghambat aliran sungai.

Sungai merupakan jenis perairan yang memiliki kecepatan arus yang cepat, maka dari itu dengan adanya sampah sekalipun dalam bentuk kecil, sampah tersebut akan terbawa dan akan menumpuk jika dibiarkan terus menerus mengalir di daerah sungai. Tumpukan sampah di sungai ini mengakibatkan permukaan air sungai menjadi lebih tinggi sehingga kapasitas sungai turun dan air akan meluber keluar dari sungai dan menyebabkan banjir

c. Kurangnya tegaknya sanksi bagi pelanggar hukum

Pemukiman yang berdiri disamping sungai seharusnya dapat ditindak tegas karena sudah jelas ada di perundang undangan perihal-hal tersebut, laluada pula kurangnya pengawasan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran seperti mendirikan bangunan tanpa memperhatikan lingkungan. Peraturan sudah ada dan jelas sekali terlampir namun problematika yang paling sederhana yang menghambat proses penyelesaian banjir ini yaitu kurangnya pengawasan dan penegakkan sehingga bagi para pelanggar masihdapat bebas dan tenang dalam menjalakan praktik pelanggaran lingkungan ini.

2) Dampak Masalah

a. Kerugian materil

Kerugian materil merupakan salah satu faktor yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Bandung akibat terjadinya banjir, terlebih apabila banjir yang terjadi dikawasan pemukiman. Mulai dari rumah, peralatan rumah tangga, hingga kendaraan yang menjadi rusak akibat terendam banjir.Hal ini tentu merugikan warga dari segi materil

b. Akses transportasi terhambat

Banjir di Kota Bandung bukan hanya melanda pemukiman warga, melainkan terjadi pula pada beberapa ruas jalan arteri maupun jalan provinsi di Kota Bandung. Hal tersebut menyebabkan terhambatnya mobilitas warga. Warga cenderung memilih untuk menunggu hingga banjir surut agar dapat beraktivitas kembali.

c. Timbulnya korban jiwa
Aliran banjir yang cukup tinggi berpotensi untuk menyeret warga yang terdampak. Jalan yang tergenang air menyebabkan lubang menjadi tak terlihat dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Selai itu banjir juga merupakan salah satu pemicu bencana lain seperti tanah longsor dan juga banjir bandang maupun banjir rob bagi daerah lain yang berpotensi menimbulkan korban jiwa.

d. Lumpuhnya kegiatan perekonomian
Lumpuhnya mobilitas warga karena banjir menyebabkan terhambatnya transportasi dan distribusi. Hal ini menyebabkan perputaran roda perekonomian yang seharusnya dapat berjalan lancar justru mengalami keterlambatan

3) Fokus Masalah

Sebagaimana yang sudah di identifikasi diatas, maka fokus masalah yang akan diangkat yaitu isu mengenai gorong-gorong yang tersumbat sampah karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke gorong-gorong tersebut.

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan penyebab dan dampak permasalahan tersebut, maka dapat diidentifikasi kebutuhan yang diperlukan yaitu :

a) Masyarakat RT 05 RW 10 Kelurahan Sukapura membutuhkan pengetahuan mengenai menjaga lingkungan dan akibat dari membuang sampah sembarangan. Dengan adanya pelatihan dan penyuluhan, diharapkan warga mengetahui akibat membuang sampah sembarangan dan dapat meminimalisir resiko-resiko yang akan terjadi.
b) Sosialisasi kepada masyarakat RW 10 terkait pentingnya program mitigasi bencana banjir terlbih ketika musim hujan.
c) Pendampingan kepda masyarakat dalam melaksanakan program mitigasi bencana seperti pengolahan sampah dan pembuatan lubang biopori dalam upaya pencegahan banjir ketika musim hujan.
d) Larangan tegas untuk tidak membuang sampah ke sungai yang akan menyumbat penyerapan air.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

1) Tokoh Masyarakat

Sebagai tokoh masyarakat, dalam pelaksanaan rencana intervensi, berperan sebagai fasilitator dalam menggerakan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan. Tokoh masyarakat juga berperan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana agar program yang dilakukan berjalan dengan baik.

2) Dinas Pekerjaan Umum (DPU)

DPU perlu dilibatkan karena berupaya membantu aliran-aliran air pada saluran air atau gorong-gorong lancar. Salah satu caranya adalah mengangkut sampah-sampah yang kerap membuat aliran air tersebut tersumbat.

3) BPBD Kota Bandung

Dalam pelaksanaan rencana intervensi, BPBD berperan sebagai Stakeholder utama dalam program pengurangan resiko bencana di Kota Bandung. Dan berperan sebagai educator terhadap masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana. Serta dilibatkan dalam kegiatan perancangan program pengurangan resiko bencana.

4) TAGANA (Taruna Siaga Bencana) Kota Bandung

Dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi tanggap darurat bencana. Tagana mempunyai peran untuk mendayagunakan dan memberdayakan generasi muda dalam penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat, dan sesudah terjadinya bencana. Sehingga dalam pelaksanaan rencana intervensi ini, tagana dapat berperan sebagai fasilitator dan edukator.

5) Kelompok PKK

Dalam rencana intervensi, berperan sebagai motivator dalam mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan perannya untuk menanggulangi terjadinya banjir seperti giat dalam kegiatan gerakan pungut sampah yang dilaksanakan setiap minggunya.

4. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggukehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (BNBP no 02 Tahun 2013).

Banjir merupakan salah satu bencana ekologi yang dialami kota-kota besar di Indonesia, termasuk salah satunya Kota Bandung yang berada pada ketinggian lebih dari 500 mdpl. Pada musim penghujan, banjir menjadi momok spesial bagi masyarakat Kota Bandung karena hujan yang turun mengakibatkan genangan air

di berbagai titik. Masalah dan solusi hilir mudik berdatangan namun permasalahan banjir masih saja menjadi topic hangat. Sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan, masyarakat dan pemerintah perlu saling berintegrasi dalam menyelesaikan masalah banjir ini. Karena jika dibiarkan, maka banjir yang di Kota Bandung berpotensi semakin meluas dan efeknya akan semakin parah.

Di dapatkan informasi banyak warga yang membuang sampah ke sungai atau ke gorong-gorong yang menyebabkan gorong-gorong tersumbat dan bila terjadi hujan, air akan meluap dan terjadi banjir. Hal ini disebabkan oleh masyarakat itu sendiri, karena kurangnya kesadaran akan lingkungan yang bersih dan tidak ada sanksi yang tegas untuk masyarakat yang membuang sampah sembarangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan pemberian sosialisasi atau penyuluhan terkait akibat dari membuang sampah sembarangan, dengan tujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat agar tetap menjaga lingkungan sekitarnya dengan baik.

a. Tujuan Umum dan Khusus

1) Tujuan Umum

Untuk mencapai agar masyarakat akan sadar bahwa pentingnya menjaga lingkungan dengan baik.

2) Tujuan Khusus

a) Merencanakan upaya pengurangan resiko yang akan terjadi
b) Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya membuang sampah sembarangan.

b. Bentuk Kegiatan dan Program

Nama program yang akan dilaksanakan yaitu “Pengurangan Resiko Genangan Air Akibat Membuang Sampah Sembaranag di RT 05 Kelurahan Sukapura”. Adapaun bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu sosialisasi. Sosialisasi ini mengenai bahaya membuang sampah sembarangan.

Tabel 2. 27 Rencana Bentuk Kegiatan "Pengurangan Resiko Genangan Air Akibat Membuang Sampah Sembaranag di RT 05 Kelurahan Sukapura".

Kegiatan Penyelesaian Masalah	Sasaran	Tujuan	Pelaksana	Penanggung Jawab	Jadwal Kerja	Sumber Biaya
Perencanaan upaya pengurangan risiko bencana banjir	Warga RT 05	Masyarakat menjadisiap siaga dalam menghadapi ancaman bencana	TAGANA	Lurah	1 hari	Kelurahan Sukapura
Sosialiasi terkait bencana dan pelatihan mengenai tanggap darurat	Warga RT 05	Meningkatnya pengetahuan warga terkait bahaya membuang sampah sembarangan dan upaya tanggap darurat	BPBD	Pekerja Sosial	1 hari	Kelurahan Sukapura

c. Sistem Partisipan

Tabel 2. 28 Sistem Partisipan

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1	Initiator System	Pekerja Sosial
2	Change Agent System	Pekerja Sosial, BPBD, TAGANA
3	Client System	Warga RT 05
4	Support System	Pemerintah Kelurahan Sukapura, warga RT 05, BPBD
5	Controlling System	Pemerintah Kelurahan Sukapura, BPBD
6	Implementing System	BPBD, Masyarakat, TAGANA, Pemerintah Kelurahan Sukapura
7	Target System	Warga RT 05
8	Action System	BPBD, TAGANA, Pemerintah Kelurahan Sukapura

d. Metode dan Teknik

Metode yang digunakan dalam program ini adalah metode *community organization and community development* atau pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Kemudian di implementasikan dengan menggunakan strategi kolaborasi. Strategi kolaborasi tersebut didukung dengan penerapan taktik *capacity building.* Peningkatan kemampuan yang dapat dilakukan dengan teknik perluasan partisipasi atau pemberdayaan kelompok-kelompok yang memerlukan peningkatan kemampuan. Beberapa teknik yang digunakan praktikan antara lain :

1) *Community Development*
   Praktikan memilih menggunakan metode *Community Organization/Community Development (CO/CD)* karena pengorganisasian masyarakat diartikan sebagai suatu proses intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui usaha bersama terencana. Sedangkan pengembangan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan oleh profesional dan penduduk setempat untuk meningkatkan ikatan sosial diantara anggota masyarakat, meningkatkan agar mampu menolong dirinya sendiri.
2) *Capacity Building*
   Peningkatan kapasitas pengetahuan sasaran terkait pengelolaan air limbah dan segala macam administrasi yang diperlukan oleh pelaku usaha industri. Kemudian diimplementasikan dengan menggunaan startegi kolaborasi.
3) Penyuluhan Sosial
   Suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi oleh penyuluh sosial baik secara lisan, tulisan, maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
4) Monitoring dan Evaluasi
   Monitor merupakan kegiatan pemantauan terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan atau perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai dampak kegiatan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan baik selama proses kegiatan maupun pada akhir program. Tujuan monitoring dan evaluasi ini adalah umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, dan untuk mengetahui kesenjangan antara perencanaan dan target.

e. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan

1) Alat

Tabel 2. 29 Alat yang dibutuhkan

No	Alat	Jumlah
1	Laptop	2
2	Kursi	40
3	Alat Tulis	4
4	LCD dan Proyektor	1

2) Rencana Anggaran Biaya

Tabel 2. 30 Rencana Anggaran Biaya Program "Pengurangan Resiko Genangan Air Akibat Membuang Sampah Sembaranag di RT 05 Kelurahan Sukapura".

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Logistik					
1.	**Banner Kagiatan Penyuluhan**	**1**	**Lembar**	**70.000,00**	**70.000,00**
2.	**Sound System**	**1**	**Unit**	**150.000,00**	**150.000,00**
3.	**ATK**	**4**	**Paket**	**20.000,00**	**80.000,00**
Honorium					
1,	**BPBD**	**1**	**Orang**	**500.000,00**	**500.000,00**
2.	**TAGANA**	**1**	**Orang**	**500.000,00**	**500.000,00**
Konsumsi					
1.	**Snack Panitia**	**6**	**Box**	**10.000,00**	**60.000,00**
2.	**Snack Tamu Undangan**	**6**	**Box**	**10.000,00**	**60.000,00**
3.	**Snack Peserta**	**21**	**Box**	**10.000,00**	**450.000,00**
Jumlah					**1.870.000,00**

f. Analisis Kelayakan Program

Tabel 2. 31 Analisis SWOT Analis Penanggulangan Bencana

Faktor Internal / Faktor Eksternal	**Kekuatan (Strength):** 1. Perangkat daerah aktif mengingatkan bahaya bencana 2. Adanya narasumber yang kompeten dan ahli di bidang kebencanaan 3. Adanya kemauan dan semangatbelajar dari masyarakat	**Kelemahan (Weakness):** Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kebencanaan
Peluang (Opportunity) 1. Program diangkat berdasarkan isu kebencanaan yang ada di RT 05 Kelurahan Sukapura 2. Dukungan dari stakeholder	**Strategi SO:** Melakukan kerja sama dengan BPBD , Kecamatan, TAGANA agar kegiatan berjalan lancar	**Strategi WO:** Semangat belajar masyarakatyang tinggi memudahkan mereka memahami pengetahuan kebencanaan
Ancaman (Threats): Kelompok siaga bencana yang sudah di bentuk tidak berjalan dengan efektif	**Strategi ST:** Melaksanakan monitoring terkait pelaksanaan oleh system pengontrol	**Strategi WT:** Pembentukan kelompok didalammasyarakat agar mempermudah penyebarluasan informasi

Berdasarkan hasil analisis kelayakan program penyuluhan bencana dengan menggunakan analisis SWOT dapat diketahui bahwa aspek kekuatan lebih banyak dibandingkan aspek kelemahan. Dapat dilihat dari kegiatan yang di dukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebagai educator serta fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan ini. Nantinya masyarakat akan mendapatkan pengetahuan mengenai kebencanaan, terutama bencana banjir. Sementara itu, anacaman untuk pelaksanaan kegiatan ini hanya satu, yaitu kemungkinan Kelompok Siaga Bencana yang telah di bentuk tidak berjalan dengan efektif. Maka dapat disimpulkan bahwa program pengembangan kapasitas masyarakat tanggap darurat bencana ini layak dilaksanakan.

g. Jadwal dan Langkah-langkah

1) Pra Pelaksanaan
   a) Membentuk panitia kerja
   b) Mengidentifikasi sasaran program
   c) Menyiapkan lokasi pelaksanaan program
   d) Menentukan narasumber dan materi yang akan disampaikan
   e) Membuat perizinan untuk pelaksanaan program
2) Pelaksanaan

Tabel 2. 32 Jadwal Pelaksanaan Program "Pengurangan Resiko Genangan Air Akibat Membuang Sampah Sembaranag di RT 05 Kelurahan Sukapura".

No	Waktu	Kegiatan	Pengisi Acara	Penanggung Jawab
1	07.30-08.00	Persiapan	Divisi Acara	Divisi Acara
2	08.00-08.05	Pembukaan oleh MC	MC	Divisi Acara
3	08.05-08.10	Sambutan Kepala Lurah Kelurahan Sukapura	Kepala Lurah	Divisi Acara
4	08.10-09.10	Penyuluhan mengenai bencana Banjir	BPBD	Divisi Acara dan Humas
5	09.10-09.25	Sesi Tanya Jawab	BPBD	Divisi Acara dan Humas
6	09.25-10.25	Sosialisasi dan pelatihan mengenai tanggap darurat bencana banjir	TAGANA	Divisi Acara dan Humas
	10.25-10.40	Sesi Tanya Jawab	TAGANA	Divisi Acara dan Humas
6	10.40-10.45	Dokumentasi	Divisi Pubdekdok	Divisi Pubdekdok
7	10.45-10.55	Penutup	MC	Divisi Acara

3) Pasca Pelaksanaan
    a) Pendampingan
    b) Pemetaan wilayah rawan banjir
    c) melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan
    d) Menyusun laporan pertanggungjawaban program

h. Indikator Keberhasilan

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program penyuluhan bencana akan disusun indikator keberhasilan sebagai berikut :

a) Meningkatnya kemampuan memelihara lingkungan menjadi lebih bersih
b) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang cara bahaya membuang sampah sembarangan
c) Kerugian harta benda dan korban jiwa berkurang.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Praktikum laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial menjadi bagian penting dalam membentuk profil lulusan yaitu sebagai analis jaminan sosial, analis sumber dana bantuan sosial, analis pemberdayaan sosial, analis penataan lingkungan, dan penanggulangan bencana. Kegiatan praktikum merupakan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan teori yang telh didapatkan ketika kegiatan belajar mengajar di kelas. Sumber data yang digunakan oleh praktikan dalam pengumpulan data ialah dengan analisis data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari studi dokumentasi. Data-data tersebut seperti data tertulis, dokumen, foto, dan literatur-literatur yang berhubungan denga masalah penelitian. Isu yang diangkat beserta intervensi yang dilakukan ketika praktikum laboratorium yaitu :

1. Analis Jaminan Sosial, praktikan mengangkat isu mengenai sebagian warga tidak mau mendaftarkan dirinya sebagai peserta KIS karena administrasi yang rumit. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, maka rencana intervensi yang dilakukan yaitu "Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Terkait Mekanisme KIS di Kelurahan Sukapura". Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi warga untuk melaksanakan mekanisme sesuai peraturan dan membahas terkait tujuan dan sasaran pelaksanaan program KIS serta hak dan kewajiban peserta KIS.
2. Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, praktikan mengangkat isu mengenai program BST yang diberikan tidak tepat sasaran dan menimbulkan kecemburuan sosial antar warga dengan KPM. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, maka rencana intervensi yang dilakukan yaitu "Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Terkait Mekanisme BST di Kelurahan Sukapura." Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada warga terkait mekanisme yang sesuai dengan peraturan dan sasaran pelaksanaan program BST.
3. Analis Pemberdayaan Sosial, praktikan mengangkat isu mengenai kurangnya pengetahuan dan keterampilan Program UP2K dalam manajamen dan distribusi produk di RW 05 Kelurahan Sukapura. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, maka rencana intervensi yang dilakukan yaitu "*Capacity Building* atau Peningkatan Kapasitas Keluarga di RW 05 Kelurahan Sukapura". Kegiatan ini bertujuan untuk tercapainya peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui usaha kelompok dari Program UP2K sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.
4. Analis Penataan Lingkungan, praktikan mengangkat isu mengenai keterbatasan mendapatkan air bersih di RW 10 Kelurahan Sukapura.

Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, maka rencana intervensi yang akan dilakukan yaitu "Peningkatan Kemampuan Pembuatan Dan Perawatan Tandon di RW 10 Kelurahan Sukapura". Kegiatan ini nantinya berisi mengenai penyuluhan penjelasan tentang tandon, cara pembuatan, dan cara perawatan tandon. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengurangi permasalahan kekurangan air bersih.

5. Analis Penanggulangan Bencana, praktikan mengangkat isu mengenai banyak genangan air sesudah hujan karena gorong-gorong tersumbat sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat sekitar. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, maka rencana intervensi yang akan dilakukan yaitu "Sosialisasi Mengenai Pengurangan Resiko Genangan Air Akibat Membuang Sampah Sembarangan di RT 05 Kelurahan Sukapura." Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu agar masyarakat sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan bahaya akan membuang sampah sembarangan.

B. Saran

1. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
   a) Penyamaan persepsi diantara dosen pembimbing dalam pelaksanaan praktikum laboratorium dan penulisan laporan akhir praktikum laboratorium.
   b) Menunjuk dosen pembimbing yang tidak terlalu sibuk atau padat aktivitasnya, sehingga dapat memberikan bimbingan kepada mahasiswanya secara optimal.
2. Politeknik Kesejahteraan Sosial
   Rekomendasi praktikan untuk Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung adalah peningkatan sistem informasi bagi mahasiswa pada setiap program studi terkait proses pembelajaran dan menerapkan teknologi yang memudahkan mahasiswanya.

DAFTAR PUSTAKA

Aminudin, M. (2019). Sampah Sumbat Gorong-gorong Disebut Penyebab Banjir di Kota Malang. *Detik News*.

AY. (2022). Akibat Kuota Terbatas, Picu Kecemburuan Sosial.

Hidayatin, N. (2022). EFEKTIFITAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM UP2K-PKK DI DESA MOJOSARIREJO KECAMATAN DRIYOREJO. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*.

Kesehatan, B. (2023). BPJS Kesehatan.

MA Zainullah, D. S. (2018). Sistem Monitoring Kondisi Aliran Pada Gorong-gorong Saluran Air Menggunakan Metode Fuzzy. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer e-ISSN, 2548*.

Naufal, F. (2022). Dampak Bantuan Sosial Tunai (BST) Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Kelurahan Awirarangan. *S1 Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Syekh Nurjati Cirebon*.

Nurulherlinda. (2016). STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM.

Palangkaraya. (2022). Pelatihan UP2K Diharapkan Mampu Meningkatkan Ekonomi Keluarga.

Selvi Selvi, S. I. (2021). Pemberdayaan dan Penguatan Ekonomi Keluarga Melalui Program UP2K-PKK Dalam Pencegahan Stunting. *Jurnal Sibermas*.

Habibullah, H. (2017). Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, *3*(1).

Anggriani, S. W. (2016). Kualitas Pelayanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan Dan Non BPJS Kesehatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, *5*(2).

Kurniawan, D., & Wustqa, D. U. (2014). Pengaruh perhatian orangtua, motivasi belajar, dan lingkungan sosial terhadap prestasi belajar matematika siswa SMP. *Jurnal riset pendidikan matematika*, *1*(2), 176-187.

Anderson, T., Barnett, E., Blosnich, J., Casper, M. L., Halverson, J., & Menard, J. Heart-healthy & stroke free; a social environment handbook.

RENAWATI, R., DARWIS, R. S., & Wibowo, H. (2017). Interaksi Sosial Anak Down Syndrome dengan Lingkungan Sosial (Studi Kasus Anak Down

Syndome yang Bersekolah di SLB PUSPPA Suryakanti Bandung). *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, *4*(2).

DI PERUSAHAAN, D. A. M. S., & PUSPITASARI, H. PELAYANAN DISTRIBUSI AIR BERSIH.

Gerungan, Wulan Mahardhika. "Penanggulangan bencana pada tahap pascabencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana." *Lex et Societatis* 7.9 (2019).

Rofifah, R., Rochana, N., Setyawan, D., & Santoso, A. (2019). *Hubungan Antara Penegtahuan Dengan Kesiapsiagaan Bencana Pada Mahasiswa Keperawatan Universitas Diponegoro* (Doctoral dissertation, Faculty of Medicine).

Harliani, F. (2014). Persepsi Masyarakat Kampung Cieunteung, Kabupaten Bandung tentang Rencana Relokasi Akibat Bencana Banjir. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, *25*(1), 37-57.

HS, A. R. (2023). *MAKNA SOSIAL BENCANA BANJIR BANDANG BAGI MASYARAKAT DI DESA NELE LAMADIKE, KECAMATAN ILE BOLENG, KABUPATEN FLORES TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

LAMPIRAN

Gambar 24 koordinasi dengan pihak Kelurahan Sukapura

Gambar 25 Kunjungan ke Posyandu RW 05

Gambar 26 Pelepasan Praktikan bersama dosen pembimbing ke pihak kelurahan sukapura

Gambar 27 MPA bersama PKK RW 10

Gambar 28 Wawancara dengan PKK RW 10

Gambar 29 Pembagian Bansos Bersama Ibu PKK RW 10

Gambar 30 Lokakarya Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Sukapura